



**DEWAN RISET DAERAH (DRD)
PROVINSI DKI JAKARTA**

LAPORAN AKHIR

Kajian Strategis Perekonomian PROVINSI DKI JAKARTA 2021

Desember 2021

**Komisi 2 – Bidang Perekonomian & Keuangan
DRD Provinsi DKI Jakarta,**

Sekretariat: Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta ,
Lantai 8, Jl Taman Jati Baru No.1, Jakarta Pusat 10110, Telp (021) 21202689, Fax 21202689,E-mail:
drd_jakarta@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan Laporan Akhir dari kegiatan Kajian Strategis Perekonomian Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021 dari Komisi 2 Bidang Perekonomian dan Keuangan - Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta. Laporan ini berisikan penjelasan tentang rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan rekomendasi hasil kajian.

Untuk tahun 2021 ini, kajian strategis perekonomian Jakarta mengangkat tema 'Revitalisasi Peran Industri Pengolahan DKI Jakarta'. Tema ini dinilai penting untuk dikaji lebih dalam karena adanya fenomena pertumbuhan industri pengolahan yang naik signifikan tahun 2020 - 2021, ditengah menurunnya kontribusi ekonomi dari sektor ini dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Sebagai lembaga pakar yang bertugas membantu Gubernur DKI Jakarta dalam memahami perkembangan pembangunan, DRD DKI Jakarta telah melakukan berbagai analisis, baik oleh tim kajian sendiri maupun melibatkan beberapa pakar dari luar DRD, menghasilkan beberapa rekomendasi dengan harapan dapat menjadi masukan yang berarti bagi pengambil kebijakan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Alhamdulillah kami ucapkan atas berhasilnya kajian ini, untuk itu kami dari tim Kajian Strategis Perekonomian Provinsi DKI Jakarta mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Ketua DRD DKI Jakarta, Bapak Kepala Bappeda DKI Jakarta, Ibu Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta, Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI, Bank Indonesia Perwakilan Jakarta, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini hingga berhasil yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Laporan akhir ini telah berhasil kami rampungkan dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi pengambil kebijakan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Jika dalam laporan ini dijumpai hal yang memerlukan perbaikan, kami dengan tangan terbuka menyambut baik masukan demi kesempurnaan buku ini dan kajian perekonomian berikutnya DRD DKI Jakarta.

Tim Kajian

EXECUTIVE SUMMARY

Dalam kondisi pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Triwulan II-2021, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 10,91% (y-on-y), di atas rata-rata nasional (7,07%). Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya beberapa sektor ekonomi yang memiliki kinerja positif, antara lain Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, menyusul Transportasi dan Pergudangan, dan Industri Pengolahan, yang tumbuh masing-masing sebesar 45,38%, 41,71%, dan 25,28%.

Industri Pengolahan menjadi penyumbang sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi Jakarta Triwulan II Tahun 2021 (y-on-y), yaitu sebesar 2,54%, di atas dari Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Transportasi dan Pergudangan. Keadaan ini cukup menarik perhatian bagi Dewan Riset Daerah DKI Jakarta karena dalam 5 tahun terakhir sebelumnya (2016-2020) kontribusi Industri Pengolahan cenderung menurun.

Berdasarkan kajian ini, ditemukan bahwa peningkatan pertumbuhan Industri Pengolahan Jakarta dalam masa pandemik Covid-19 adalah sesaat, sangat dipengaruhi oleh kebijakan pelonggaran protokol kesehatan Covid-19 dimana industri mulai bergerak beroperasi normal, dan hanya titik balik dari nilai pertumbuhan yang sangat rendah pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, fenomena ini tidak mencerminkan kondisi Industri Pengolahan Jakarta semestinya yang selama ini menghadapi berbagai kendala untuk bertahan di Jakarta.

Beberapa tantangan telah diidentifikasi jika membangun Industri Pengolahan akan datang di Jakarta. Permasalahan tersebut antara lain tata ruang, inovasi produk, efisiensi produksi dan ketersediaan bahan baku, keterbatasan lahan, utilitas air, gas, pengolahan limbah, kemacetan, tuntutan upah minimum yang semakin naik, kemajuan teknologi Industri 4.0., tuntutan lingkungan yang bersih termasuk Industri Hijau dan Berkelanjutan, investasi, dan logistik (Pergudangan).

Setelah memetakan isu-isu yang akan dihadapi tersebut di atas ke dalam analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) maka diperoleh beberapa skenario strategi yang penting untuk diambil dalam mengarahkan pembangunan industri pengolahan di Jakarta. Strategi ini kemudian dituangkan dalam satu susunan rekomendasi sebagai berikut:

1. Menyusun Roadmap Industri yang mempertimbangkan Industri 4.0 dan Industri Hijau, yang berbasis digitalisasi dan berkarakteristik High Tech
2. Menjadikan DKI Jakarta sebagai International Hub untuk Pusat Logistik dan Pintu Gerbang kegiatan Ekspor dan Impor bagi daerah sekitarnya
3. Mengembangkan Industri dengan konsumsi energi hijau/energi biru (ramah lingkungan) dan minim ruang, namun menghasilkan nilai tambah yang besar seperti industri kreatif, industri jasa, dan industri riset
4. Membangun sumber daya manusia yang akan berpartisipasi di industri dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat
5. Membangun ekosistem inovasi dan kewirausahaan melalui belanja pemerintah yang berkualitas dan produktif
6. Menyiapkan insentif fiskal yang optimal untuk menarik investasi di sektor bisnis, riset, dan jasa
7. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat dalam pemberian layanan untuk meningkatkan investasi dan produktivitas industri

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Executive Summary

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Metodologi	3
1.5. Waktu Pelaksanaan	4
1.6. Pelaksana Kegiatan	5
BAB 2 KONDISI EKONOMI JAKARTA	6
2.1. Pengaruh ekonomi Jakarta terhadap daerah lainnya	6
2.2. Struktur Ekonomi Jakarta	7
2.3. Pelaku dan Sektor Ekonomi Jakarta	12
2.4. Peran UMKM dalam Perekonomian Jakarta	18
BAB 3 PERAN INDUSTRI PENGOLAHAN JAKARTA	21
2.1. Perekonomian Jakarta	22
2.2. Peran Industri Pengolahan Jakarta	26
2.3. Kondisi Industri Pengolahan Jakarta	30
BAB 4 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN JAKARTA	32
4.1. Kebijakan Industri Nasional	32
4.2. Tujuan dan Arah Kebijakan Industri Jakarta	35
4.3. Strategi dan Program Pembangunan Industri Jakarta	40
BAB 5 STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN JAKARTA DI MASA DEPAN	42
5.1. Lingkungan Industri	42
5.2. Analisis Strategi	45
REKOMENDASI	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kondisi pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Triwulan II-2021, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 10,91% (y-on-y), di atas rata-rata nasional (7,07%). Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya beberapa sektor ekonomi yang memiliki kinerja positif, antara lain Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, menyusul Transportasi dan Pergudangan, dan Industri Pengolahan, yang tumbuh masing-masing sebesar 45,38%, 41,71%, dan 25,28%.

Industri Pengolahan menjadi penyumbang sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi Jakarta Triwulan II Tahun 2021 (y-on-y), yaitu sebesar 2,54%, di atas dari Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Transportasi dan Pergudangan yang masing-masing menyumbangkan 2,01%, 1,59%, dan 1,25%. Keadaan ini cukup menarik perhatian karena sangat berbeda dengan setahun sebelumnya, dimana Industri Pengolahan justru menjadi penyumbang tertinggi bagi pertumbuhan ekonomi Jakarta yang negatif, yakni -2,38 persen dari total pertumbuhan ekonomi Jakarta -8,33 persen.

Selain menjadi penggerak utama dalam peningkatan PDRB, Industri Pengolahan juga memiliki peran menyerap Tenaga Kerja, menghasilkan produk untuk kebutuhan domestik dan ekspor, sumber peningkatan devisa negara melalui perdagangan internasional, dan meningkatkan penggunaan kandungan bahan baku lokal dan memberikan peningkatan nilai tambah.

Peran signifikan Industri Pengolahan dalam Perekonomian Jakarta khususnya di masa pandemi Covid-19 menjadi perhatian dari Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta, khususnya Komisi 2 Bidang Perekonomian dan Keuangan. Dibalik data pertumbuhan yang cukup mengesankan tersebut di atas, banyak hal yang menjadi pertanyaan, antara lain bagaimana sebenarnya kinerja industri pengolahan di Jakarta, dan seperti apa yang diharapkan akan datang. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi isu utama yang akan dijawab dalam kajian strategi perekonomian Dewan Riset Daerah DKI Jakarta Tahun 2021.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kajian Strategis Perekonomian DKI Jakarta adalah melakukan serangkaian analisis terhadap perkembangan industri pengolahan yang memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian DKI Jakarta.

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengembangan industri pengolahan dalam perekonomian DKI Jakarta dimasa akan datang.

1.3. Ruang lingkup

Kajian strategis perekonomian Jakarta untuk tahun anggaran 2021 ini mengangkat tema '**Revitalisasi Peran Industri Pengolahan DKI Jakarta**'. Industri pengolahan dalam kajian ini didefinisikan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan menjadi barang jadi atau setengah jadi atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai atau konsumen akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri atau makloon dan pengerjaan perakitan (*assembling*).

Skala industri yang digunakan didasarkan pada Jumlah Tenaga Kerja.

1. Industri Mikro = 1 - 4 pekerja
2. Industri Kecil = 5 - 19 pekerja
3. Industri Sedang = 20 - 99 pekerja
4. Industri Besar = 100 atau lebih pekerja

Kajian ini melingkupi serangkaian analisis dan penyusunan rekomendasi. Analisis yang dimaksud antara lain:

1. Analisis perekonomian Jakarta
2. Analisis peran industri pengolahan dalam perekonomian Jakarta
3. Analisis kebijakan pembangunan industri Jakarta
4. Analisis strategi pengembangan industri pengolahan Jakarta

Analisis perekonomian Jakarta dikerjakan pada awal-awal kegiatan dimana pengaruh pandemi Covid-19 sudah setahun. Sedangkan analisis peran industri pengolahan dikerjakan pada saat data dan informasi tentang perekonomian Jakarta sudah diperbaharui.

1.4. Metodologi

Kajian strategi perekonomian Jakarta dilaksanakan dengan paralel analisis antara kondisi realitas industri dan kebijakan yang mengarahkannya. Analisis ini akan melihat gap yang kemudian dilanjutkan dengan identifikasi permasalahan, identifikasi alternatif solusi, alternatif kebijakan yang direpresentasikan dalam suatu rekomendasi kebijakan (Gambar 1,1).



Gambar 1.1. Alur pikir kajian

Metode yang digunakan dalam kajian ini antara lain pengumpulan data sekunder dan primer, studi literatur, *Focus Group Discussion (FGD)*, *brainstorming*, *trend analysis*, *SWOT analysis*, dan *policy analysis*.

Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan dan perancangan kegiatan.
2. Pengumpulan data sekunder dan primer.
3. Analisis dan pengolahan data.
4. Perumusan rekomendasi kebijakan.
5. Validasi hasil.
6. Pelaporan kegiatan

1.5. Waktu Pelaksanaan

Kajian ini dilaksanakan pada bulan Juni – Desember 2021 dengan rincian waktu sebagaimana dalam tabel berikut.

Kegiatan	Thn 2021						
	06	07	08	09	10	11	12
Perencanaan dan perancangan kegiatan							
Pengumpulan Data							
Penyelenggaraan FGD							
- FGD 1: Peran Industri Pengolahan dalam Pembangunan Ekonomi DKI Jakarta			27/08				
- FGD 2: Kebijakan pembangunan industri nasional dan implikasinya bagi industri pengolahan dan perekonomian di DKI Jakarta						05/11	
Pengolahan dan Analisis Data							
Perumusan Rekomendasi: Rapat pembahasan rekomendasi di Ruang Rapat Lt. 8 DRD DKI Jakarta							21/12
Validasi hasil: Validasi dan diseminasi hasil di Ruang Kolaborasi Kantor Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan Pemprov DKI Jakarta							28/12
Penyusunan Laporan Akhir							

1.6. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kajian ini berasal dari anggota DRD DKI Jakarta dengan struktur sebagai berikut:

- Pengarah : Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D.
(Ketua DRD)
- Penanggung Jawab : Teddy Rionald Bachtiar, S.T (Ketua Komisi 2)
- Ketua Pelaksana : Dr. Ir. Jaizuluddin Mahmud, M.T.
- Sekretaris : Dr. Ir. Susy Y.R. Sanie, M.Si
- Tenaga Ahli :
- Anang Kelanajaya Umaedi, S.E, Ak, M.B.A
 - Sunarsip, Ak, M.E.
 - Khoirunurrofik, Ph.D
 - Ir.Emir Riza Avialda, M.B.A
 - Dr. Ir. Aisa Tobing, M.Sc, MCP
 - Ir. Priyadi Priya Utama, M.Si.
 - Mohamad Soleh Nurzaman, S.E, MDEc, Ph.D

BAB 2 KONDISI EKONOMI JAKARTA

Secara makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan dari kuartal pertama tahun 2019 ke kuartal 1 2020 sebesar 2,1% dari 5,07% (Q1 2019) ke 2,97% (Q1 2020) dengan provinsi yang tumbuh paling lambat adalah provinsi Jambi dengan pertumbuhan di kuartal 1 2020 sebesar 1,65%. Beberapa provinsi justru mengalami pertumbuhan minus di kuartal 1 2020, diantaranya adalah provinsi DIY dan Bali. Hal ini dikarenakan rendahnya dan matinya sejumlah aktivitas sektor yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi wilayah.

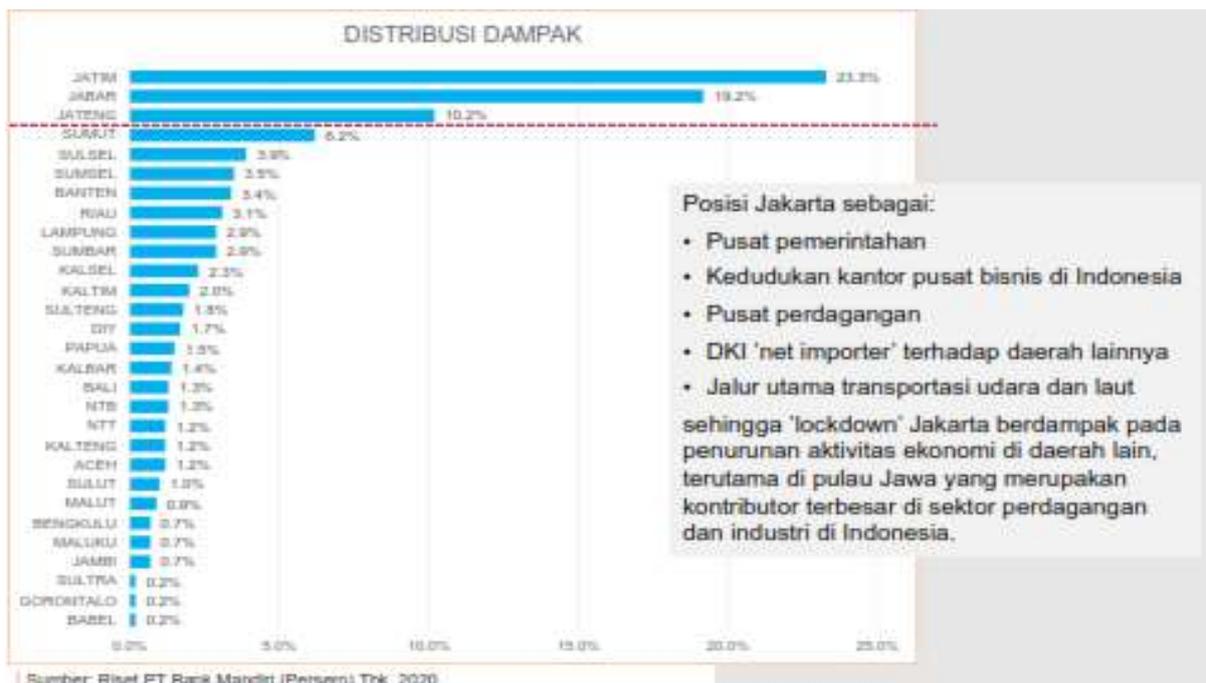
2.1. Pengaruh perekonomian Jakarta terhadap daerah lainnya

Kebijakan *lock-down* yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah, namun juga diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi lainnya. Jawa Timur sebagai provinsi yang paling terdampak akibat *lock down* Jakarta dengan persentase distribusi dampak sebesar 23,3%, kemudian diikuti oleh provinsi Jawa Barat sebesar 19,2%, dan Jawa Tengah sebesar 10,2%.



Gambar 2.1. Pertumbuhan ekonomi seluruh daerah terdampak Covid-19

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan kondisi perekonomian antar wilayah. Kebijakan *lock down* memberikan dampak penurunan aktivitas ekonomi di beberapa wilayah lain dikarenakan posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan, kedudukan kantor pusat bisnis di Indonesia di mana menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis dan perdagangan, Jakarta menjadi *net-importer* terhadap daerah lainnya, dan Jakarta sebagai jalur utama transportasi udara dan laut. Pulau Jawa sebagai wilayah yang paling terdampak karena merupakan kontributor terbesar di sektor perdagangan dan Industri di Indonesia.



Gambar 2.2. Distribusi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi daerah akibat 'lock down' Jakarta

2.2. Struktur Ekonomi Jakarta

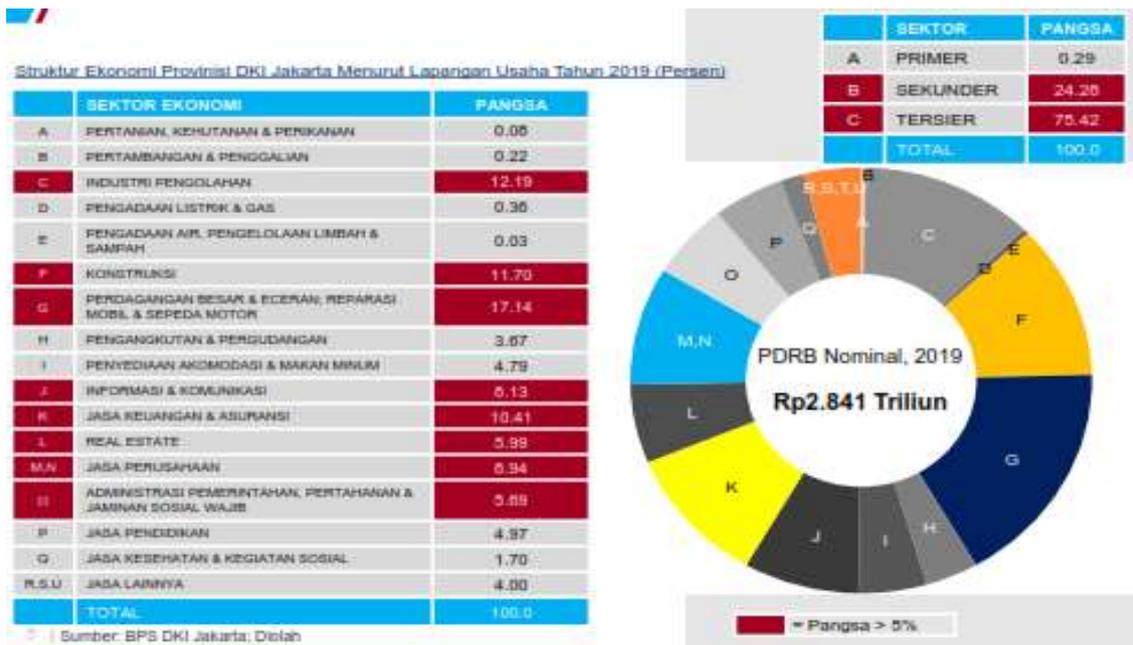
Berdasarkan data struktur ekonomi DKI Jakarta, dapat dijelaskan bahwa sektor sekunder dan tersier menjadi sektor yang mendominasi PRDB DKI Jakarta dengan pangsa pasar 24,28% untuk sektor sekunder dan 75,42% untuk sektor tersier. Lebih dari 85% PRDB Industri Pengolahan DKI Jakarta berasal dari 5 sub-sektor, diantaranya adalah Industri Alat Angkutan, Industri Kimia, Farmasi & Obat Tradisional, Industri Makan Minum, Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik dan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi. Industri Alat Angkut menjadi industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar yaitu lebih dari 50% terhadap PDRB sektor Industri Pengolahan DKI Jakarta.

Menurut komponen pendapatan, surplus usaha menjadi komponen terbesar bagi pembentuk PDRB DKI Jakarta. Dominasi Surplus Usaha dalam pembentukan PDRB DKI Jakarta menurut pendapatan sangat wajar, mengingat banyaknya jumlah perusahaan multinasional yang beroperasi di Jakarta. Selama 3 tahun berturut-turut (2016, 2017, dan 2018), telah terjadi perubahan struktur PDRB, dimana pangsa Surplus Usaha menurun sedangkan pangsa Upah/Gaji meningkat. Perubahan struktur ini merupakan dampak kenaikan UMP Jakarta. Rata-rata kenaikan UMP tiga tahun tersebut adalah sebesar 10,59% per tahun. Lebih dari 50% upah/ gaji berasal dari 4 sektor ekonomi yaitu sektor administrasi pemerintahan (18,58%), perdagangan (12,31%), industri pengolahan (10,60%), dan konstruksi (10,01).

Secara neto pendapatan, DKI Jakarta memiliki pendapatan faktor neto yang surplus. Namun, surplus aliran pendapatan faktor neto ini disebabkan karena Surplus Usaha jauh lebih besar dibandingkan dengan defisit dari upah/ gaji. Pendapatan faktor neto Upah/Gaji Provinsi DKI Jakarta bernilai negatif yang berarti bahwa nilai Upah/Gaji yang keluar dari Jakarta lebih besar dari nilai Upah/Gaji yang masuk ke Jakarta. Fenomena ini mengindikasikan bahwa lebih banyak tenaga asing dan pekerja komuter yang menggantungkan nafkahnya di Jakarta dibandingkan penduduk Jakarta yang bekerja di luar Jakarta maupun luar negeri.

Pendapatan faktor neto surplus usaha mempunyai nilai positif dimana nilai positif ini mencerminkan bahwa surplus usaha yang masuk ke Jakarta lebih banyak dibandingkan nilai yang keluar dari Jakarta. Selain itu, penduduk maupun perusahaan Jakarta banyak yang memiliki saham di perusahaan yang berlokasi di provinsi lain bahkan di luar negeri.

Berdasarkan data struktur ekonomi DKI Jakarta, dapat dijelaskan bahwa sektor sekunder dan tersier menjadi sektor yang mendominasi PRDB DKI Jakarta dengan pangsa pasar 24,28% untuk sektor sekunder dan 75,42% untuk sektor tersier.



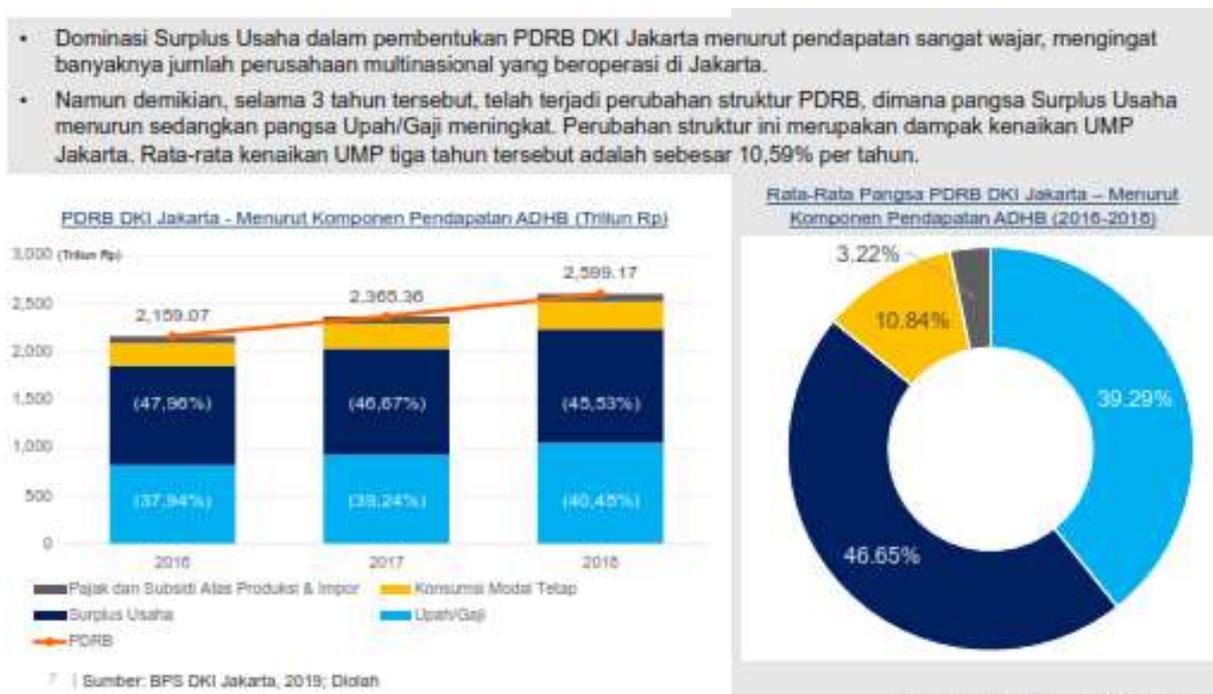
Gambar 2.3. Struktur Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 (dalam persen)

Lebih dari 85% PRDB Industri Pengolahan DKI Jakarta berasal dari 5 sub-sektor, diantaranya adalah Industri Alat Angkutan , Industri Kimia, Farmasi & Obat Tradisional, Industri Makan Minum, Industri Barang Logam; Komputer , Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik dan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi. Industri Alat Angkut menjadi industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar yaitu lebih dari 50% terhadap PDRB sektor Industri Pengolahan DKI Jakarta.



Gambar 2.4. Kontribusi subsektor industri pengolahan terhadap PDRB DKI Jakarta

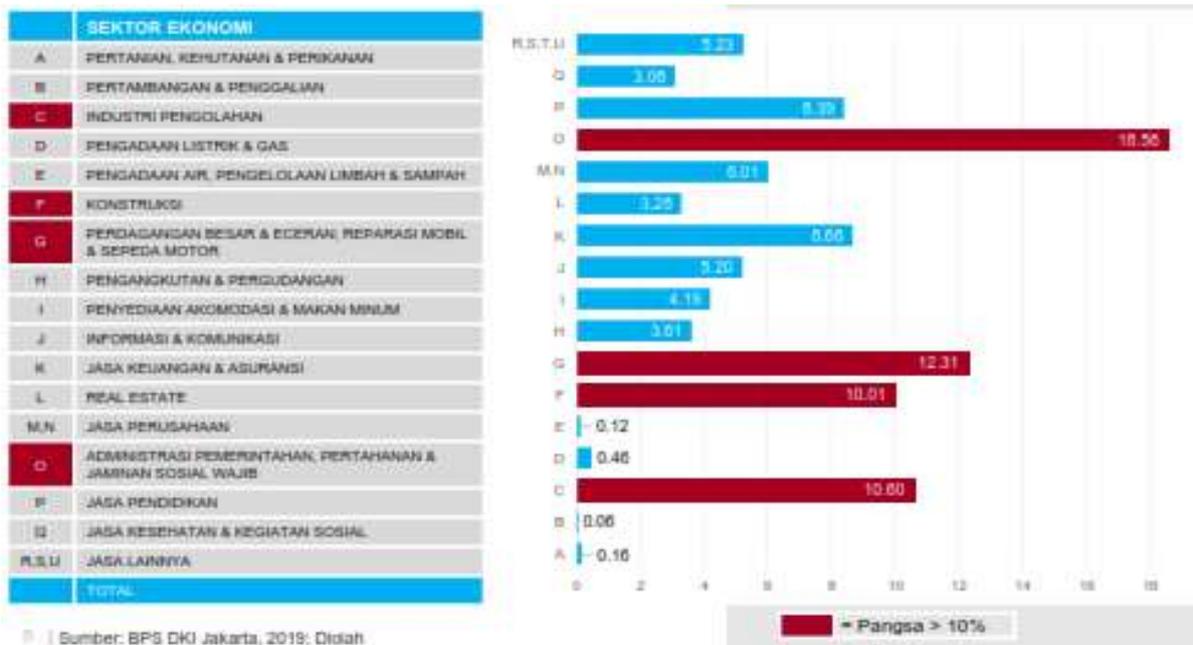
Menurut komponen pendapatan, surplus usaha menjadi komponen terbesar bagi pembentuk PDRB DKI Jakarta. Dominasi Surplus Usaha dalam pembentukan PDRB DKI Jakarta menurut pendapatan sangat wajar, mengingat banyaknya jumlah perusahaan multinasional yang beroperasi di Jakarta. Selama 3 tahun berturut-turut (2016,2017, dan 2018), telah terjadi perubahan struktur PDRB, dimana pangsa Surplus Usaha menurun sedangkan pangsa Upah/Gaji meningkat. Perubahan struktur ini merupakan dampak kenaikan UMP Jakarta. Rata-rata kenaikan UMP tiga tahun tersebut adalah sebesar 10,59% per tahun. Lebih dari 50% upah/ gaji berasal dari 4 sektor ekonomi yaitu sektor administrasi pemerintahan (18,58%), perdagangan (12,31%), industri pengolahan (10,60%), dan konstruksi (10,01).



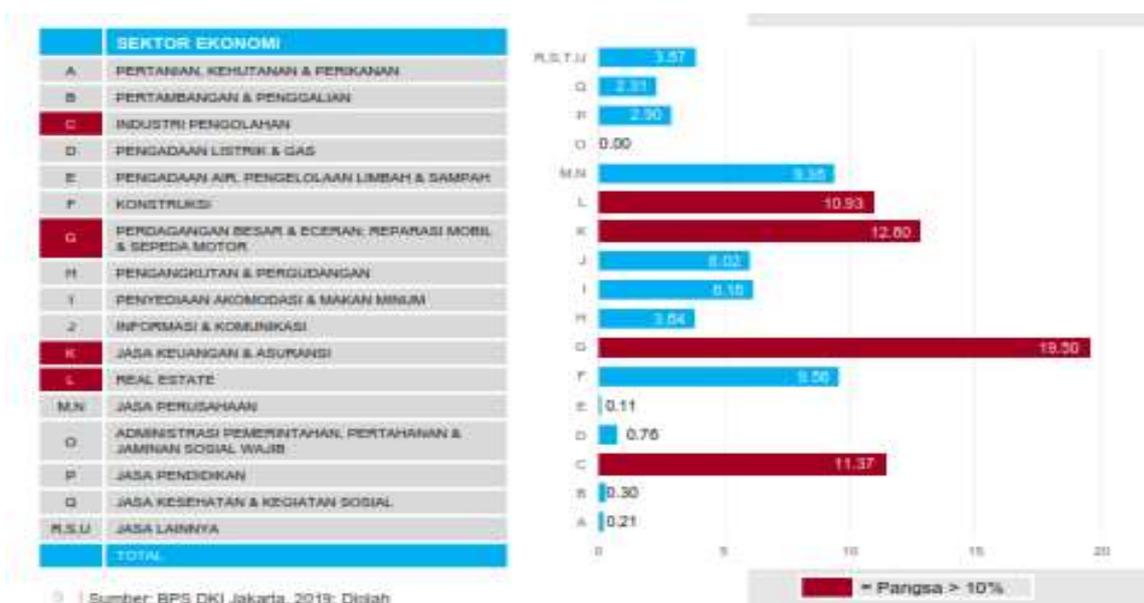
Gambar 2.5. Surplus usaha pembentuk PDRB DKI Jakarta menurut komponen pendapatan

Secara neto pendapatan, DKI Jakarta memiliki pendapatan faktor neto yang surplus. Namun, surplus aliran pendapatan faktor neto ini disebabkan karena Surplus Usaha jauh lebih besar dibandingkan dengan defisit dari upah/ gaji. Pendapatan faktor neto Upah/Gaji Provinsi DKI Jakarta bernilai negatif yang berarti bahwa nilai Upah/Gaji yang keluar dari Jakarta lebih besar dari nilai Upah/Gaji yang masuk ke Jakarta.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa lebih banyak tenaga asing dan pekerja komuter yang menggantungkan nafkahnya di Jakarta dibandingkan penduduk Jakarta yang bekerja di luar Jakarta maupun luar negeri. Pendapatan faktor neto surplus usaha mempunyai nilai positif dimana nilai positif ini mencerminkan bahwa surplus usaha yang masuk ke Jakarta lebih banyak dibandingkan nilai yang keluar dari Jakarta. Selain itu, penduduk maupun perusahaan Jakarta banyak yang memiliki saham di perusahaan yang berlokasi di provinsi lain bahkan di luar negeri.



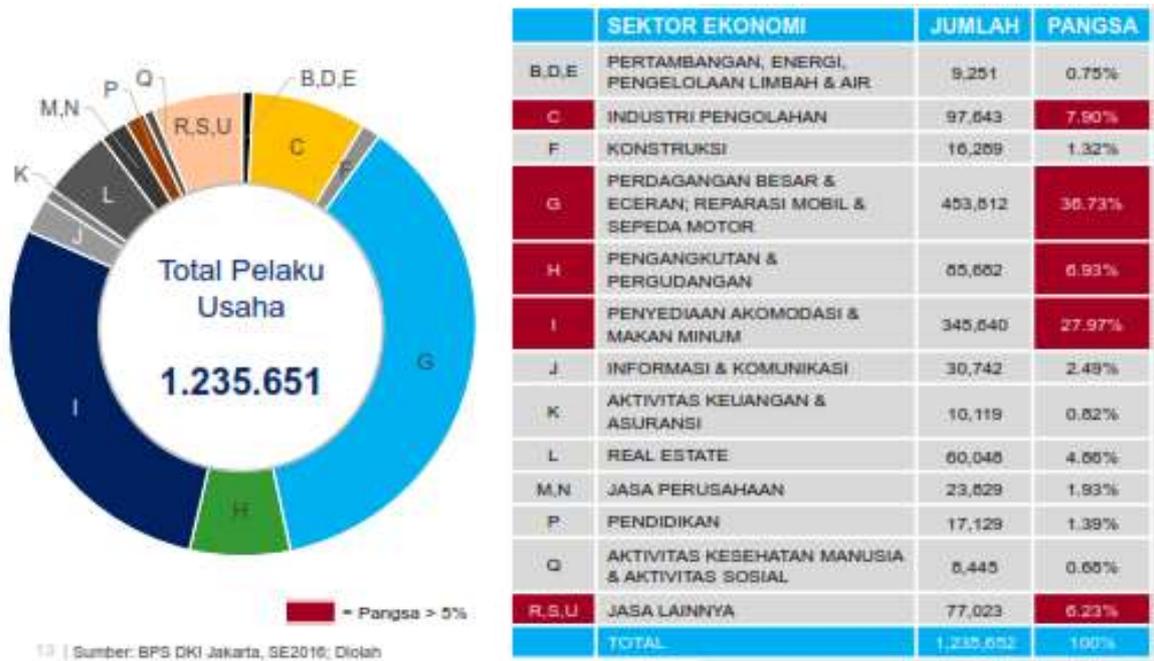
Gambar 2.7. Upah/Gaji sektor ekonomi



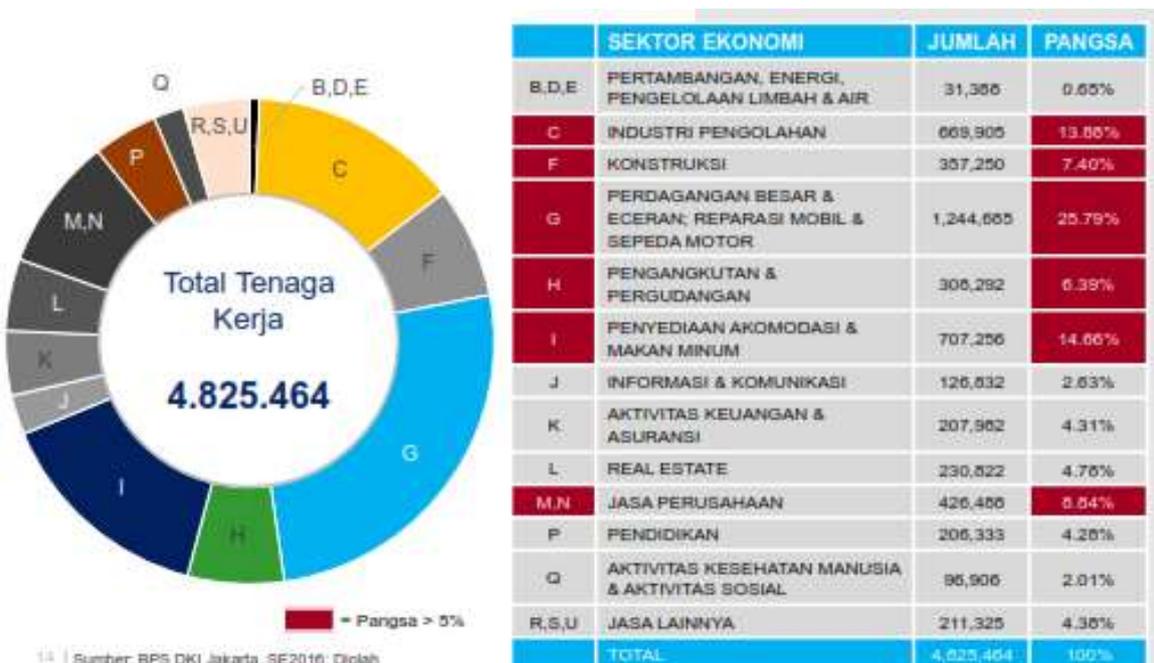
Gambar 2.8. Surplus usaha netto sektor ekonomi

2.3. Pelaku dan sektor ekonomi Jakarta

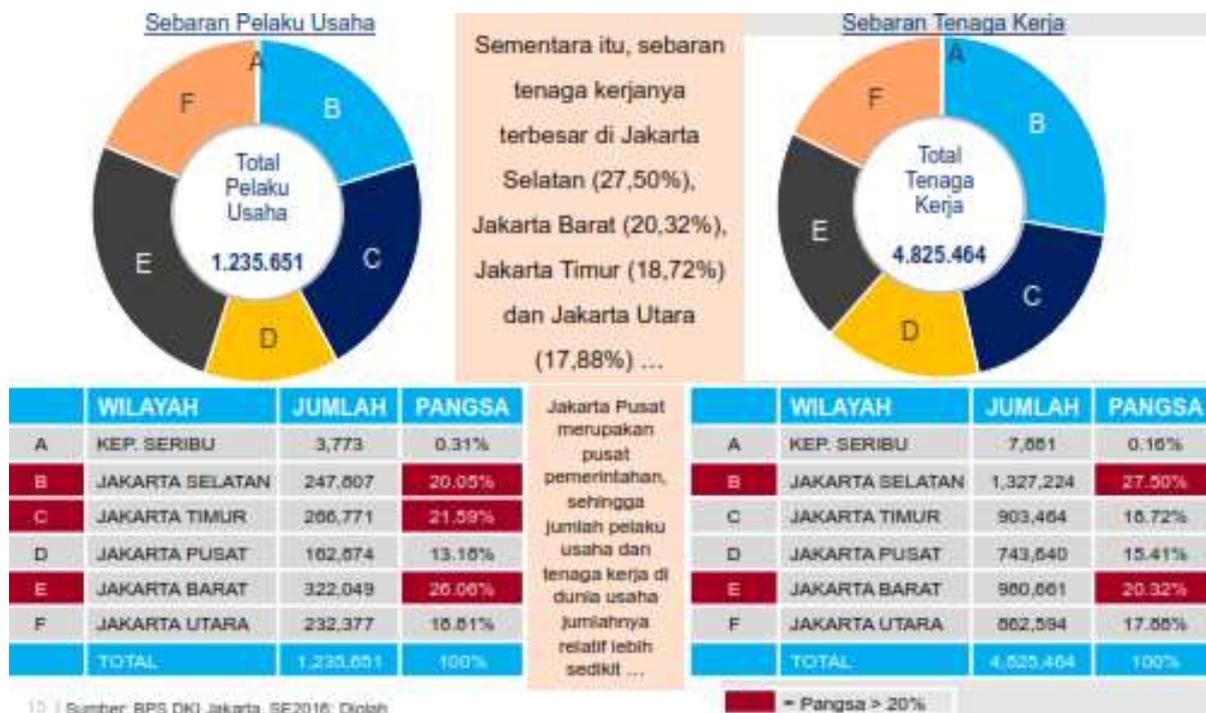
Lebih dari 70% pelaku usaha di DKI Jakarta bekerja di 3 sektor ekonomi utama, diantaranya sektor industri pengolahan (7,9%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (27,97%), dan sektor perdagangan besar dan eceran (36,73%).



Gambar 2.9. Pelaku usaha sektor ekonomi



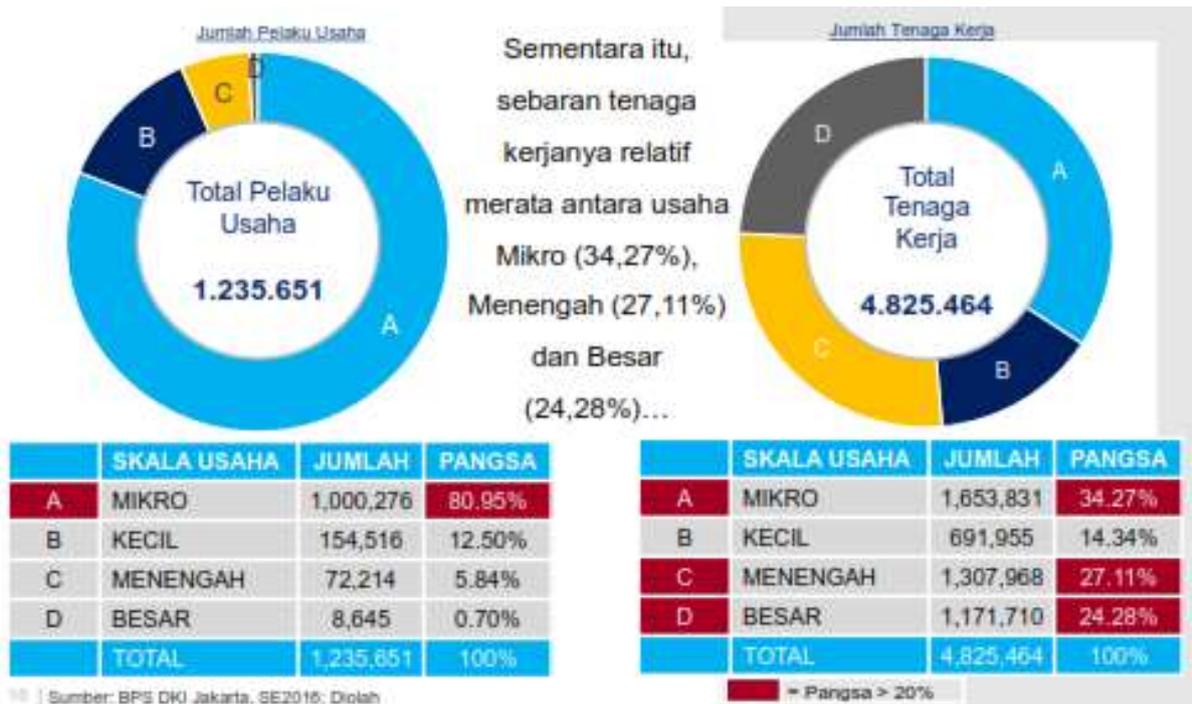
Gambar 2.10. Tenaga kerja sektor ekonomi



Gambar 2.11. Sebaran wilayah pelaku usaha

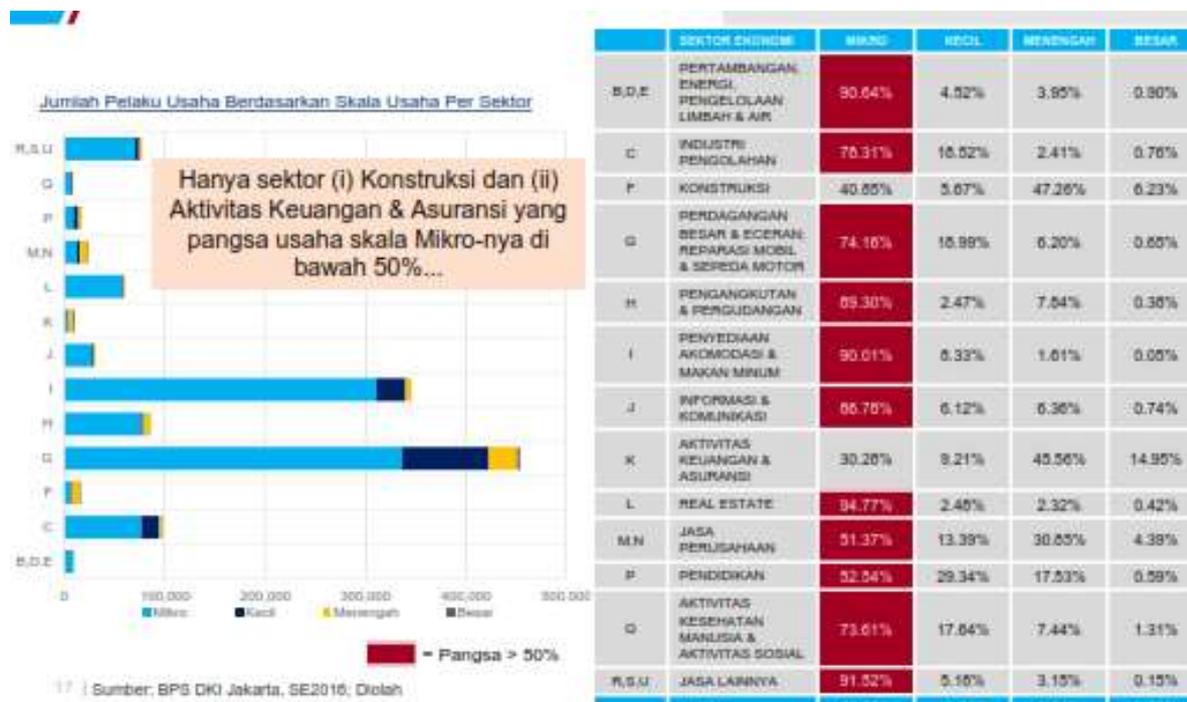
Lebih dari 90% pelaku usaha di DKI Jakarta bekerja di usaha Mikro (80,95%) dan Kecil (12,50%) yang tersebar di 3 sektor utama yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan sektor Industri Pengolahan. Meskipun pelaku usaha besar terbilang minim, sebesar kurang dari 1%, namun sektor usaha besar termasuk salah satu sektor usaha yang menyerap tenaga kerja besar di Indonesia sebesar 24,28% dengan komposisi tenaga kerja di setiap skala usaha relatif merata.

Sebagian besar pelaku usaha di DKI Jakarta belum memanfaatkan fasilitas internet terutama untuk pelaku usaha di sektor Perdagangan dan Penyediaan Akomodasi & Makan Minum yang sebagian besar merupakan pelaku di usaha Mikro. Hanya sekitar kurang dari 10% pelaku usaha yang telah memanfaatkan internetnya untuk menjalankan usahanya.



Gambar 2.12. Pelaku usaha Mikro dan Kecil

Dari seluruh pelaku usaha, lebih dari 80% di DKI Jakarta hanya mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 5% terutama perusahaan/ pelaku usaha yang menjalankan usahanya di sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang sebagian besar merupakan sektor usaha Mikro.

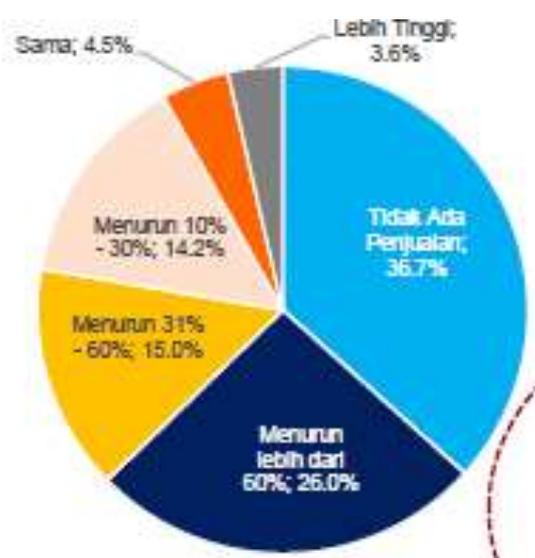


Gambar 2.13. Pelaku usaha berdasarkan skala usaha



Gambar 2.14. Komposisi tenaga kerja berdasarkan skala usaha

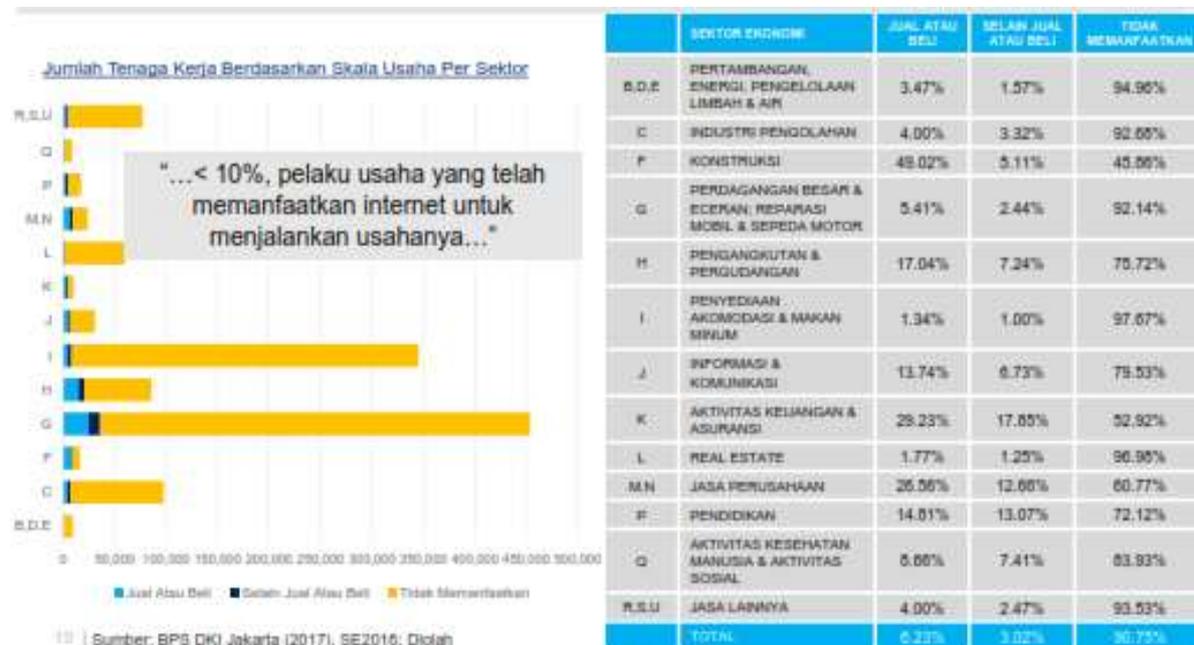
Melihat kondisi saat ini, pandemi ini memberikan dampak terhadap bisnis UMKM di mana 36,7% bisnis UMKM tidak menerima penjualan selama periode covid 19, 26% mengalami penurunan penjualan lebih dari 60%, 15% mengalami penurunan antara 31-60%, 14,2% mengalami penurunan di antara 10-30%, dan sisanya mengalami penjualan dengan nilai jumlah yang sama dengan periode sebelumnya dan 3,6% mengalami peningkatan nilai penjualan (Gambar. 2.15)



Sumber: Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI)

Gambar 2.15. Kondisi usaha berdasarkan skala usaha

Kendala yang dialami pelaku bisnis UMKM mayoritas adalah kebutuhan lebih atas restrukturisasi pinjaman atau kredit (92,6%), keterbatasan pasokan bahan baku (48,3%), dan tidak dapat melakukan pembayaran pinjaman (26,6%).



Gambar 2.16. Pemanfaatan internet pelaku usaha



Gambar 2.17. Kelompok usaha berdasarkan tenaga kerja

Karena mayoritas pelaku bisnis di DKI Jakarta adalah pelaku sektor usaha UMKM, terjadinya *sudden stop* UMKM sangat berdampak besar terhadap penurunan PDRB di DKI Jakarta. Dengan skenario *sudden-stop* selama 3 bulan, DKI Jakarta mengalami estimasi kerugian pendapatan mencapai 1,09% terhadap PDRB sedangkan Bodetabek mengalami estimasi kerugian pendapatan sebesar 4,75%. Sedangkan untuk kerugian *output* diestimasi mencapai 3,41% terhadap PDRB untuk wilayah DKI Jakarta dan kerugian *output* mencapai 15,20%% untuk wilayah Bodetabek.

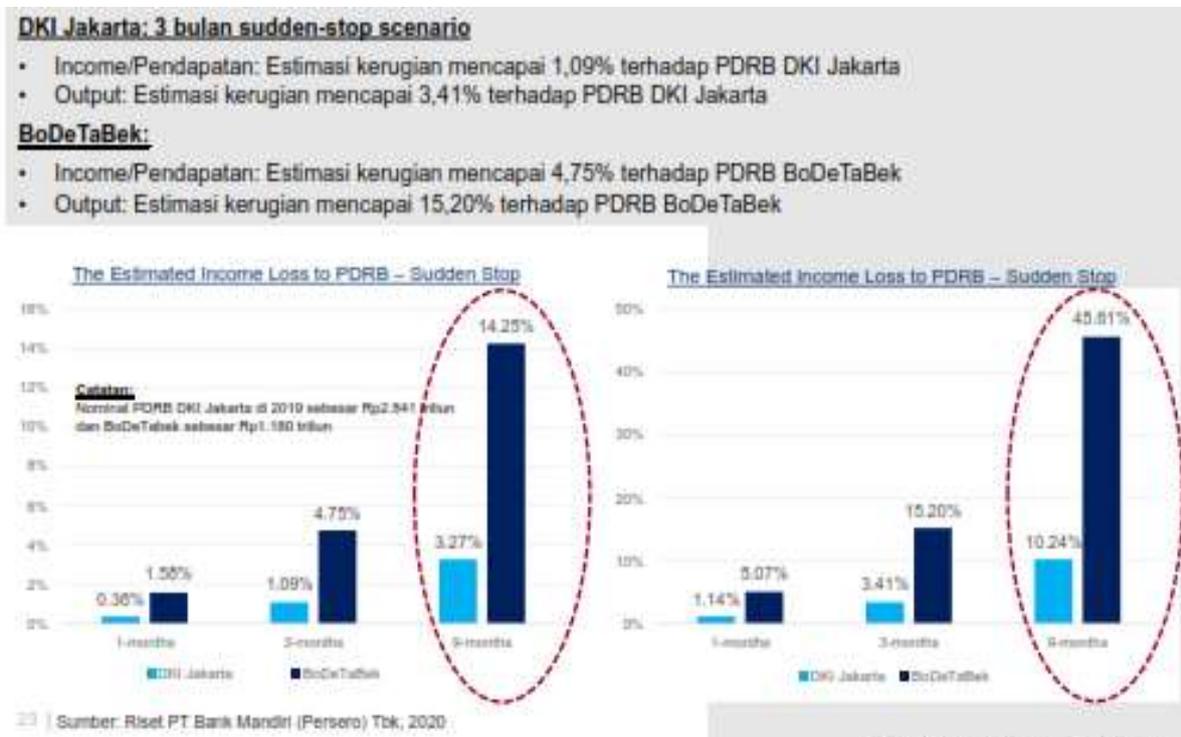


Gambar 2.18. Dampak Covid-19 terhadap bisnis

Mengacu pada data BPS, 2019 dijelaskan bahwa terdapat beberapa sektor ekonomi dengan *magnitude* besar dapat diandalkan untuk mendorong pemulihan ekonomi DKI Jakarta pasca covid-19, diantaranya adalah kontributor pelaku usaha sebesar 90,65%, tenaga kerja sebesar 81,74%, dan pendapatan sebesar 85,72%.

2.4. Peran UMKM dalam perekonomian Jakarta

Merespon kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi saat ini, pemerintah memberikan dukungan terhadap pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 melalui stimulus fiskal di level kebijakan Makro seperti dana dukungan ABPM untuk pemulihan UMKM terdampak covid-19 sebesar 68,21 triliun rupiah yang diberikan melalui subsidi bunga untuk UMKM dan Ultra Mikro dengan total subsidi sebesar 34,15 triliun, alokasi untuk insentif perpajakan UMKM sebesar 28,06 triliun, dan dukungan pinjaman UMKM sebesar 6 triliun rupiah. Dukungan pinjaman UMKM ini berupa pembayaran imbal jasa penjaminan, *counter guarantee* (penjaminan balik), *loss limit*, atau dukungan *risk sharing* lainnya yang dibutuhkan.

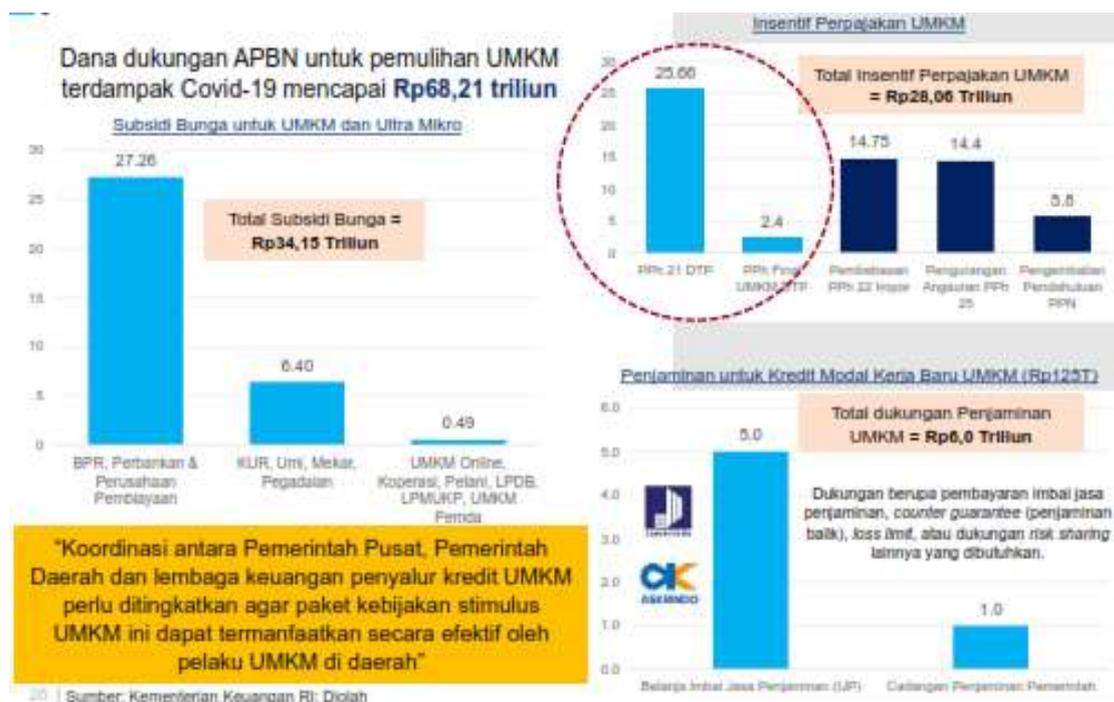


Gambar 2.19. UMKM terhadap penurunan PDRB

High Priority: Pelaku Usaha	High Priority: Aspek Ketenagakerjaan	High priority: Kontribusi Pendapatan
1. Perdagangan	1. Perdagangan	1. Perdagangan
2. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2. Jasa Keuangan & Asuransi
3. Industri Pengolahan	3. Industri Pengolahan	3. Industri Pengolahan
4. Pengangkutan & Pergudangan	4. Jasa Perusahaan	4. Real Estate
5. Real Estate	5. Konstruksi	5. Konstruksi
	6. Pengangkutan & Pergudangan	6. Jasa Perusahaan
	7. Real Estate	7. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum
		8. Pengangkutan & Pergudangan
Kontributor Pelaku Usaha = ~ 90,65%	Kontributor Tenaga Kerja = ~ 81,74%	Kontributor Pendapatan = ~ 85,72%

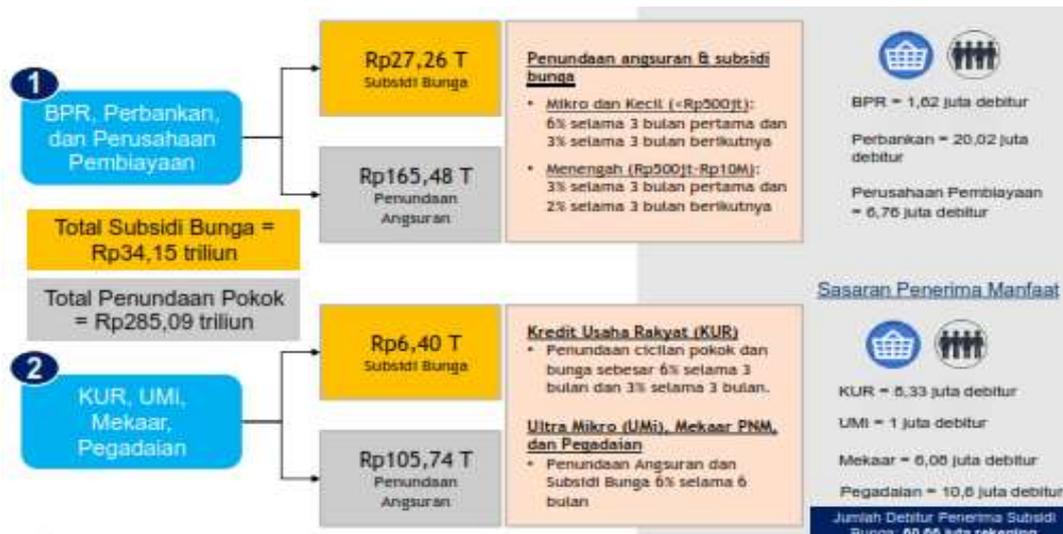
Sumber: BPS 2021

Gambar 2.20. Kontribusi sektor ekonomi bagi pemulihan ekonomi



Gambar 2.21. Dukungan kebijakan makro terhadap UMKM terdampak Covid-19

Selain itu, kebijakan Makro yang diberikan pemerintah lainnya adalah stimulus kredit UMKM dengan total *outstanding* kredit penerima subsidi bunga sebesar 1.601 triliun rupiah. Paket stimulus subsidi bunga kredit yang diberikan pemerintah dengan total 34,1 triliun rupiah dan total penundaan pokok dengan total 285,1 triliun rupiah yang disalurkan melalui BPR, Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan, KUR, UMi, Mekar, Pegadaian.



Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2021

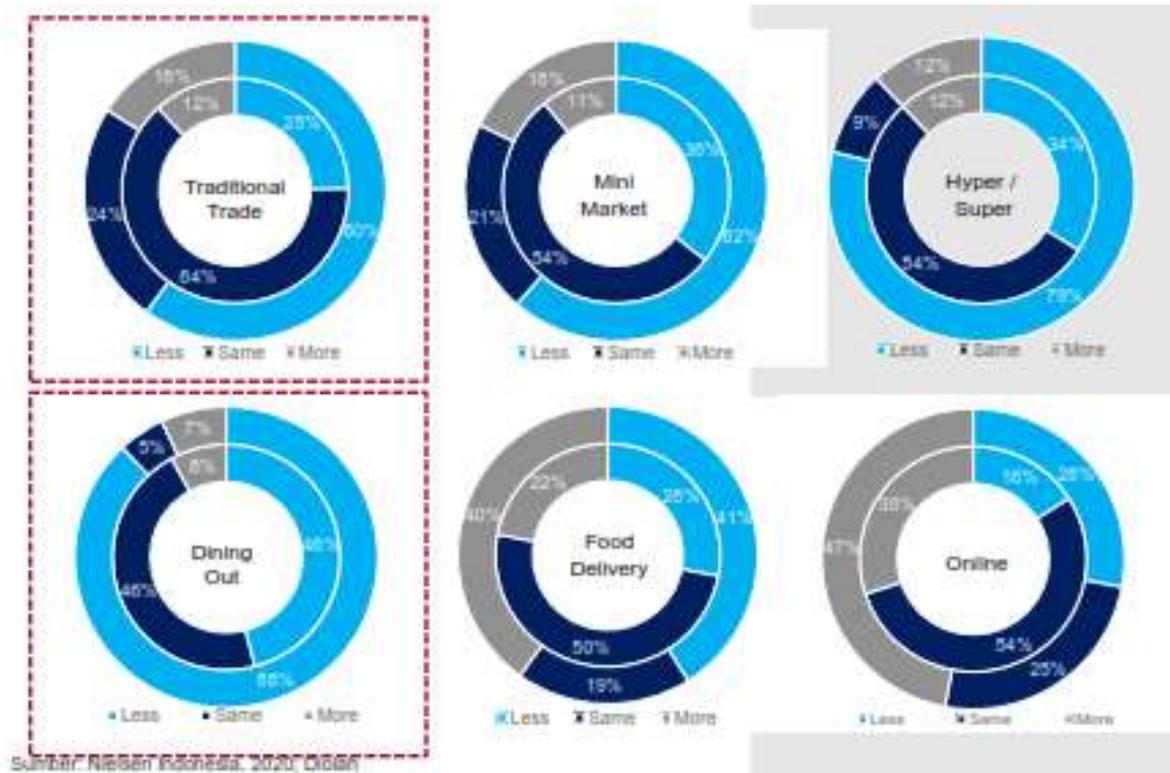
Gambar 2.22. Paket stimulus pemerintah

Sedangkan untuk kebijakan Mikro, pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat berfokus pada peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar melalui pengembangan kapasitas usaha, standardisasi dan sertifikasi produk, dan penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada peningkatan penciptaan peluang usaha melalui pelatihan teknis dan kewirausahaan, Inkubasi usaha, digitalisasi UMKM, dan penguatan kapasitas layanan usaha.



Gambar 2.23. Pemanfaatan kredit UMKM

Dalam kondisi saat ini, UMKM harus mampu beradaptasi terhadap perubahan perilaku dan kebutuhan konsumen terutama terkait penggunaan teknologi informasi, modifikasi produk, kolaborasi pasokan, standar keamanan, dan diversifikasi pasar. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN/D, dan pemangku kepentingan lain sangat dibutuhkan untuk mampu mempercepat proses adaptasi UMKM.



Gambar 2.24. Pengurangan aktivitas belanja secara fisik

Tantangan yang tengah dihadapi di masa pandemi ini adalah mengakselerasi UMK melalui mendorong penggunaan internet yang notabene per tahun 2017, hanya 15,9% UMK non pertanian yang menggunakan fasilitas internet untuk mendukung bisnis. Kecenderungan konsumen mengurangi aktivitas belanja secara fisik ke pasar tradisional, mini market, super market. Begitu pula konsumen menghindari untuk mendatangi restoran, mereka umumnya membawa makanan keluar, atau memesan lewat online.

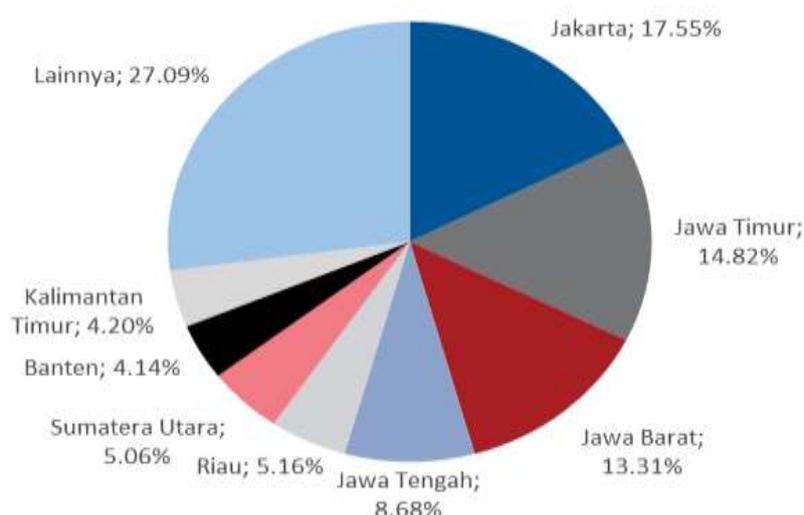
BAB 3 PERAN INDUSTRI PENGOLAHAN

JAKARTA

3.1. Perekonomian Jakarta

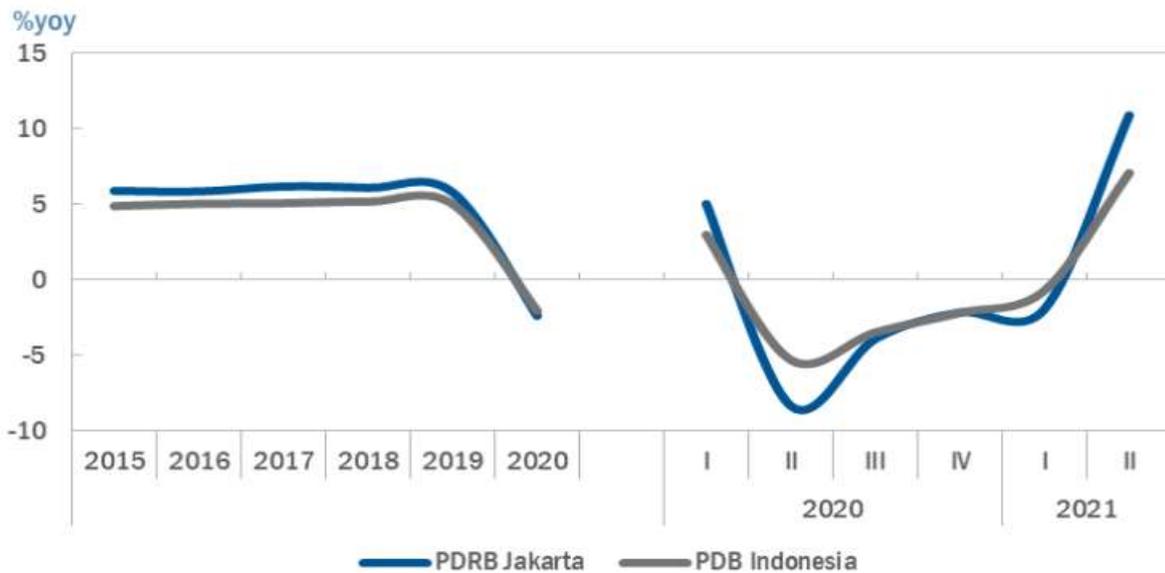
Ditengah kekhawatiran akan kondisi ekonomi nasional akibat pandemik Covid-19, pada Triwulan II-2021, perekonomian Jakarta justru memperlihatkan pertumbuhan meningkat tajam, naik sebesar 10,91% (y-on-y). Nilai ini jauh berbeda dibanding setahun sebelumnya dimana perekonomian triwulan II-2020 berkontraksi cukup dalam, yakni - 8,3%. Pertumbuhan perekonomian yang mencapai dua digit ini melebihi rata-rata nasional yang naik sebesar 7,7%. Kondisi ini mengindikasikan adanya pemulihan perekonomian yang signifikan terjadi di DKI Jakarta.

Pangsa ekonomi Provinsi DKI Jakarta terhadap perekonomian Indonesia merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, yakni mencapai 17,55% (rata-rata 5 tahun terakhir). Secara historis, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta selama tahun 2015 s.d. 2019 berada di angka rata-rata 5,98% (y-on-y). Angka tersebut tercatat lebih tinggi dari perekonomian nasional yaitu sebesar 5,03% (yoy). Namun, seiring dengan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal Maret 2020, perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2020 tercatat kontraksi sebesar -2,36% (y-on-y), lebih dalam dari kontraksi perekonomian Nasional (-2,07%, y-on-y).



Sumber: BPS 2021

Gambar 3.1. Pangsa Ekonomi Provinsi



Sumber: BPS 2021

Gambar 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta

Perekonomian Jakarta juga terjadi dibanding dari triwulan sebelumnya, yakni naik 0,08 persen (q-on-q). Kenaikan ini terjadi karena ada momen Ramadhan, Idul Fitri, libur sekolah dan pencairan THR. Hal ini mendorong meningkatnya pengeluaran konsumsi Makanan dan Minuman, Pakaian dan Alas Kaki serta Jasa Perawatannya. Demikian pula pada Pengeluaran untuk Transportasi, Rekreasi dan Komunikasi juga meningkat meskipun ada larangan mudik yang diberlakukan oleh Pemerintah.



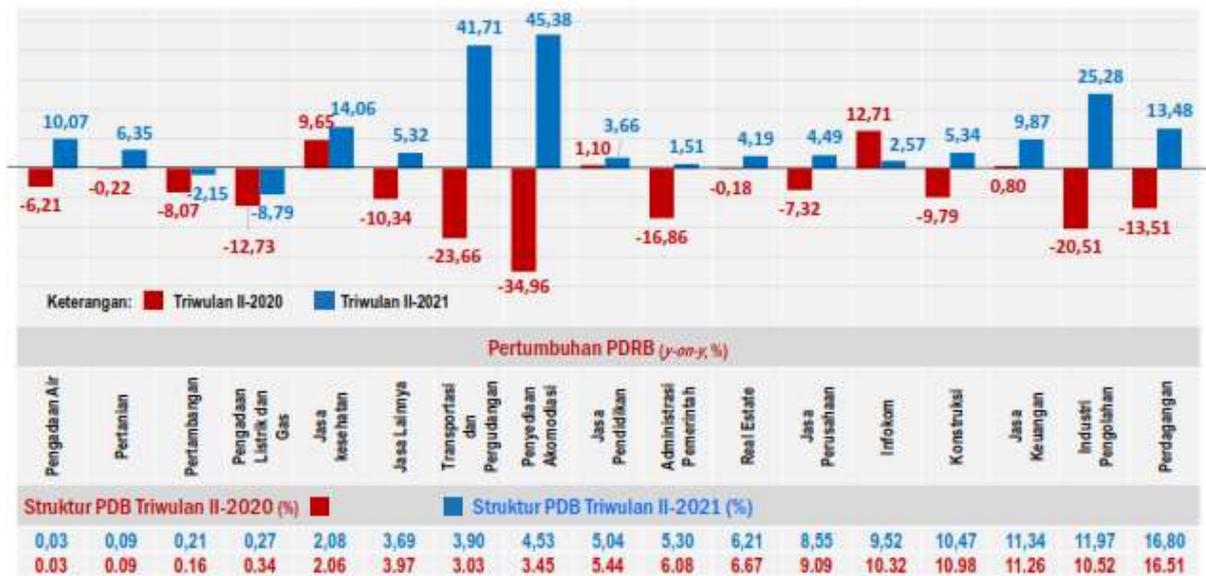
Sumber: BPS 2021

Gambar 3.3. Laju pertumbuhan ekonomi Jakarta Tahun 2020-2021

Tabel 3.1. Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi DKI Jakarta Triwulan II-2021

Lapangan Usaha / Industry	Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku / Distribution at Current Price (%)	Pertumbuhan / Growth (%)			Sumber Pertumbuhan Terhadap Triwulan II 2020 / Source of Growth Year-on- Year (Y-on-Y)
		Terhadap Triwulan I 2021 / Quarter- to-Quarter (Q-to-Q)	Terhadap Triwulan II 2020 / Year-on-Year (Y-on-Y)	Terhadap Semester I 2020/ Cumulative -to- Cumulative (C-to-C)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Livestock, Forestry, and Fishing	0,09	6,04	6,35	2,89	0,01
B Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying	0,21	3,48	(2,15)	(4,28)	(0,00)
C Industri Pengolahan / Manufacturing	11,97	(0,90)	25,28	10,51	2,54
D Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas	0,27	(11,15)	(8,79)	(7,87)	(0,03)
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang / Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,03	1,69	10,07	6,32	0,00
F Konstruksi / Construction	10,47	(5,39)	3,34	(0,43)	0,60
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	16,80	(0,28)	13,48	5,65	2,01
H Transportasi dan Pergudangan / Transportation and Storage	3,90	3,92	41,71	17,42	1,25
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / Accommodation and Food Service Activities	4,53	2,34	45,38	11,20	1,59
J Informasi dan Komunikasi / Information and Communication	9,52	0,92	2,57	5,16	0,37
K Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial and Insurance Activities	11,34	(0,52)	9,87	0,50	1,14
L Real Estat / Real Estate Activities	6,21	0,31	4,19	2,46	0,29
M,N Jasa Perusahaan / Business Activities	8,55	0,27	4,49	(0,24)	0,39
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defense; Compulsory Social Security	5,30	11,67	-1,51	0,29	0,06
P Jasa Pendidikan / Education	5,04	1,19	3,66	1,81	0,19
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health and Social Work Activities	2,08	0,48	14,06	14,51	0,28
R,S,T,U Jasa Lainnya / Other Services Activities	3,69	1,15	5,32	(2,66)	0,20
PDRB / GDP	100,00	0,08	10,91	4,10	10,91

Perbaikan perekonomian Jakarta pada periode 2020-2021 ditopang oleh beberapa kelompok lapangan usaha yang berkinerja positif, antara lain Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Pergudangan, dan Industri Pengolahan yang masing-masing tumbuh sebesar 45,38 persen, 41,71 persen, dan 25,28 persen.



Sumber: BPS 2021

Gambar 3.4. truktur dan pertumbuhan PDRB Jakarta menurut Lapangan usaha Triwulan II Tahun 2020-2021

Khusus untuk Industri pengolahan, berdasarkan BPS 2021, pada triwulan II-2021 tumbuh dua digit sebesar 25,28% secara (y-on-y) dan merupakan pertumbuhan positif pertama sejak pandemi Covid-19. Industri pengolahan tumbuh tinggi terutama industri alat angkatan. Menurut asosiasi GAIKINDO, produk industri mobil tumbuh 521%.



Sumber BPS (2021)

Gambar 3.5. Laju pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan (y-on-y) (persen)

3.2. Peran Industri Pengolahan Jakarta

Industri pengolahan di Jakarta memiliki peran yang strategis. Selain menyerap Tenaga Kerja, industri pengolahan juga menghasilkan produk untuk kebutuhan domestik dan ekspor, sumber peningkatan devisa negara melalui perdagangan internasional, dan meningkatkan penggunaan kandungan bahan baku lokal dan memberikan peningkatan nilai tambah.

Berdasarkan data BPS 2021, lapangan usaha dari Industri Pengolahan menduduki peringkat kedua setelah Perdagangan Besar dan Eceran dalam kontribusinya terhadap PDRB Jakarta. Walaupun perannya signifikan namun dalam 5 tahun terakhir periode 2016-2020, kontribusi Industri Pengolahan cenderung berkurang, menurun dari 13,47% (2016) menjadi 11,37% (2020), berbeda dengan sektor-sektor jasa yang cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 3.1. Struktur PDRB Jakarta menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/Industry	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
B	Pertambangan dan Pengaliran/Mining & Quarrying	0,24	0,24	0,25	0,22	0,16
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	13,47	13,42	13,18	12,32	11,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	0,29	0,31	0,35	0,37	0,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
F	Konstruksi/Construction	12,52	12,32	12,14	11,71	11,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	16,60	16,68	16,96	17,20	16,62
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	3,55	3,62	3,63	3,71	3,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation & Food Service Activities	5,04	4,93	4,78	4,79	4,19
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	7,27	7,64	7,87	8,21	9,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	10,58	10,64	10,36	10,56	11,27
L	Real Estat/Real Estate Activities	6,20	6,16	6,03	5,94	6,31
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	7,42	7,93	8,15	8,65	8,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	5,70	5,17	5,45	5,48	5,30
P	Jasa Pendidikan/Education	5,59	5,24	5,13	4,99	5,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	1,70	1,69	1,70	1,71	2,12
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	3,70	3,87	3,91	4,03	3,95
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

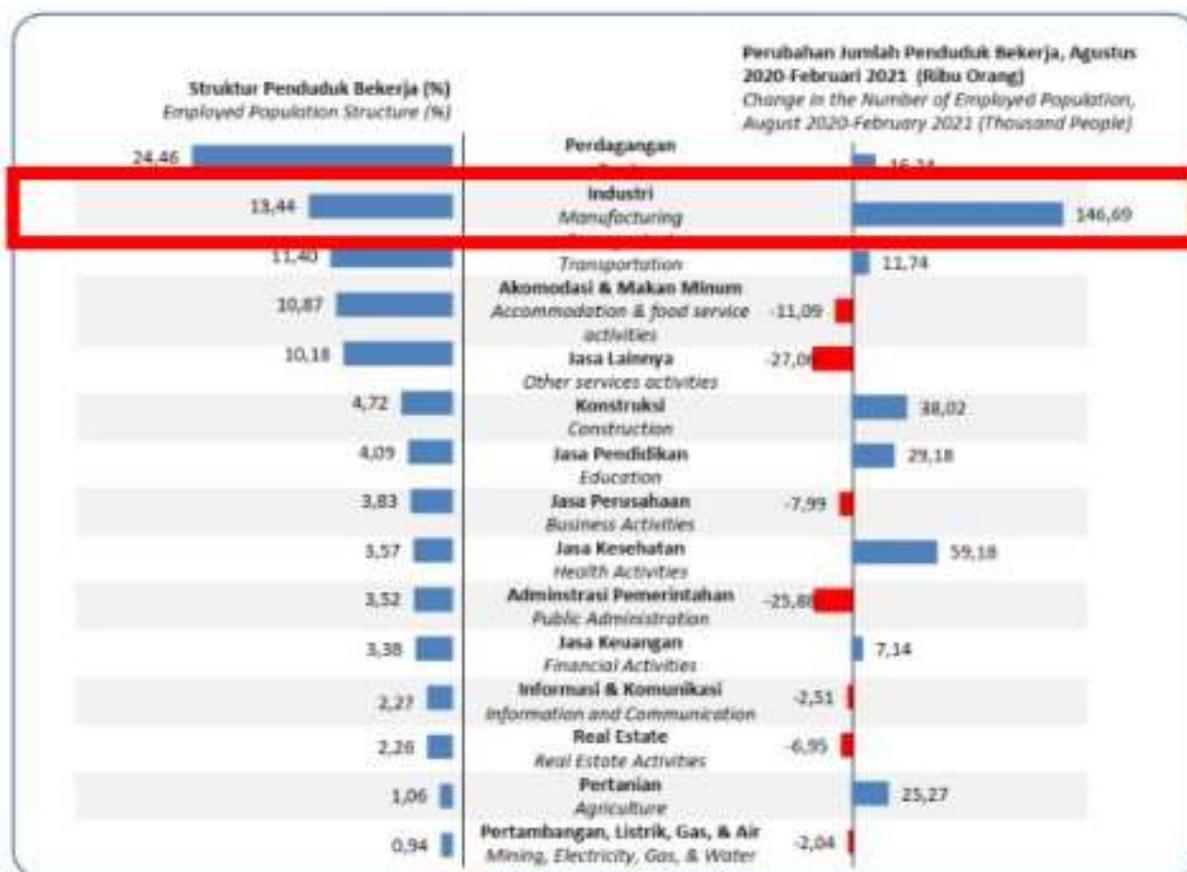
Sumber BPS (2021)

Penurunan kinerja sektor industri pengolahan di DKI Jakarta selama ini dikarenakan daya dukung industri yang terbatas, antara lain lahan untuk industri semakin terbatas, upah minimum tertinggi dan akan terus meningkat, dan pasokan air terbatas (status kelangkaan mutlak). Dibalik itu, ada daya dukung lainnya dapat diandalkan, yaitu kapasitas listrik yang masih mampu menyuplai industri, dan daya serap pasar tinggi dan akses untuk ekspor relatif mudah. Industri Pengolahan merupakan kelompok usaha yang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja terbanyak pada Februari 2021 yakni 146,69 ribu pekerja, disusul Jasa Kesehatan dan Konstruksi yang masing-masing bertambah 59,18 dan 38,02 ribu pekerja.

Tabel 3.2. Penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan di DKI Jakarta

Status pada Pekerjaan Utama Main Employment Status	Penduduk Bekerja (Orang) Number of employed population (people)		Selisih (orang) Change (people)
	Agustus 2020 August 2020	Februari 2021 February 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Agriculture, Forestry, and Fishing	26 934	52 201	25 267
2. Industri Pengolahan Manufacturing	513 194	659 881	146 687
3. Konstruksi Construction	193 479	231 498	38 019
4. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil Wholesale and Retail Trade, Repair Trade, Repair of Motor vehicles and Motorcycles	1 184 665	1 200 909	16 244
5. Transportasi dan Pergudangan Transportation and Storage	547 763	559 500	11 737
6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Accommodation and Food Service Activities	544 938	533 845	-11 093
7. Informasi dan Komunikasi Information and Communication	114 059	111 550	-2 509
8. Jasa Keuangan dan Asuransi Financial and Insurance Activities	158 916	166 058	7 142
9. Real Estat Real Estate Activities	117 823	110 871	-6 952
10. Jasa Perusahaan Business Activities	195 989	187 995	-7 994
11. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	198 729	172 852	-25 877
12. Jasa Pendidikan Education	171 610	200 789	29 179
13. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Human Health and Social Work Activities	116 292	175 471	59 179
14. Jasa Lainnya Other Services Activities	526 867	499 805	-27 062
15. Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik, Gas; dan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Mining and Quarrying; Electricity and Gas; and Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	47 993	45 949	-2 044
Jumlah / Total	4 659 251	4 909 174	249 923

Sumber: BPS 2021

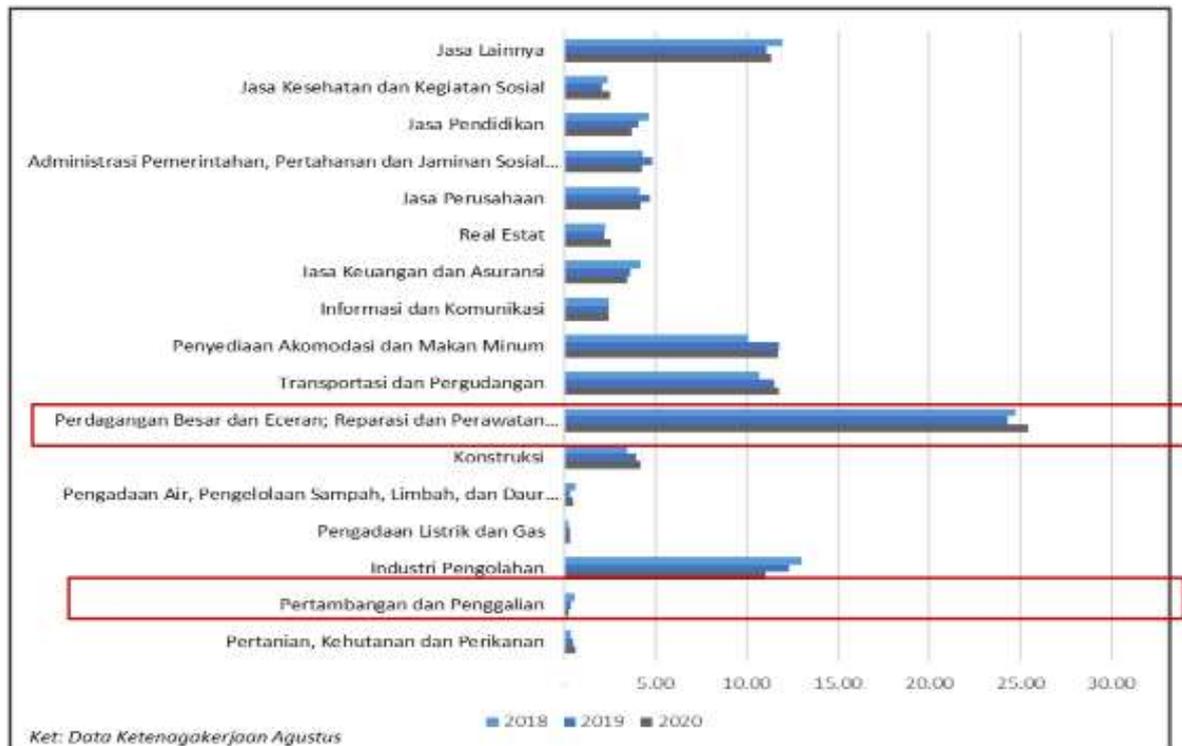


Sumber: BPS 2021

Gambar 3.6. Struktur dan perubahan penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan di Jakarta

Walaupun tahun 2021 penyerapan tenaga kerja di Industri Pengolahan cukup menggembirakan, namun beberapa tahun hingga 2020, pangsa tenaga kerja di lapangan usaha ini terpantau menurun. Tahun 2017, Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 13,2% terhadap total tenaga kerja di Jakarta, kemudian turun berangsur-angsur hingga tahun 2020 yakni 11,0%.

Pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja di sektor ini sebesar 513.194 orang, turun 81.655 orang dibandingkan jumlah tenaga kerja pada tahun 2019 yang mencapai 594.849 orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh pembatasan aktivitas pada industri pengolahan yang diizinkan untuk beroperasi dengan kapasitas sebesar 50%, serta turunnya permintaan barang yang berdampak kepada penghentian produksi pada sejumlah pabrik.



Kondisi Agustus

Sumber: BPS, diolah

Gambar 3.7. Pangsa Tenaga Kerja Lapangan Usaha di DKI Jakarta

Industri Pengolahan juga memberikan kontribusi besar terhadap ekspor produk unggulan Jakarta. Dari 10 komoditas unggulan Jakarta, 9 diantaranya adalah produk Industri Pengolahan, atau sekitar 71% dari total ekspor Jakarta.

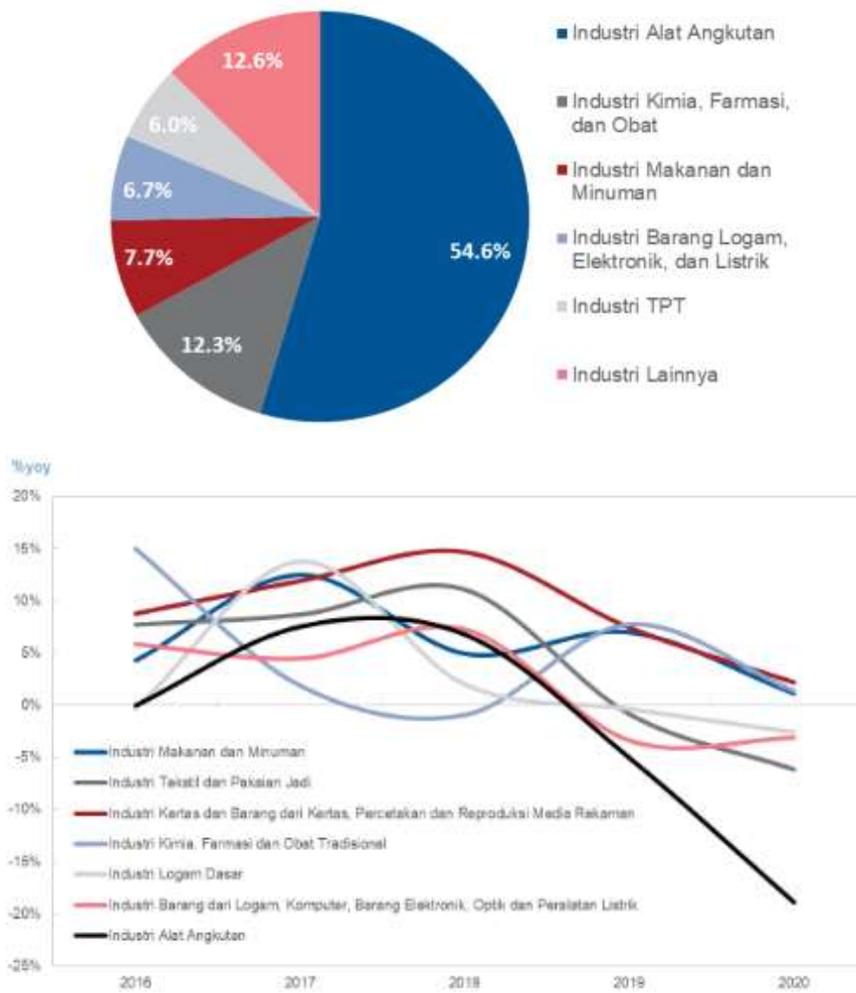
Tabel 3.3. Ekspor unggulan Jakarta berdasarkan golongan barang

No.	Golongan Barang/ Commodity Group	Nilai (FOB Juta US\$)/ Value (FOB million US\$)			% Perubahan/ % Change)		Peran thd total (%)/ Share (%)
		June '20	May '21	June '21	June '21 Thd May '21/ month to month	June '21 thd June '20/ year-on- year	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kendaraan dan Bagianannya/ Vehicles others than railway	114,29	181,35	271,63	49,78	137,66	26,96
2	Perhiasan dan Permata / Pearls, precious and semi prec. stone	189,90	82,68	185,40	124,24	-2,37	18,40
3	Ikan dan Udang/ Fish, crustaceans, molluscs, oth. invert	63,13	72,25	74,97	3,77	18,76	7,44
4	Mesin-mesin dan Pesawat Mekanik / Nuclear react., boilers, mech. apply	35,20	51,83	64,50	24,44	83,22	6,40
5	Lemak & Minyak Hewan / Nabati / Animal or vegt. Fats and oils	26,30	34,97	55,04	57,40	109,27	5,46
6	Mesin / Peralatan Listrik / Elect. machinery, sound rec. TV, etc	34,38	35,28	36,70	4,01	6,74	3,64
7	Berbagai Produk Kimia / Miscellaneous chemical products	22,82	20,37	32,36	58,84	41,82	3,21
8	Sabun dan Preparat Pembersih / Soap, washing prep., waxes, candles	17,87	23,37	28,04	19,99	56,97	2,78
9	Barang-barang Rajutan/Articles of apparel accessories	12,24	18,56	25,02	34,83	104,43	2,48
10	Pakaian Jadi Bukan Rajutan/Articles of apparel access. not knit	19,11	17,68	23,58	33,39	23,41	2,34
Total 10 Golongan Barang / Total of Ten Commodities group		535,24	538,35	797,25	48,09	48,95	79,12
Lainnya / Others		157,59	182,05	210,38	15,56	33,50	20,88
Total Ekspor Jakarta/ Total Export of Jakarta		692,83	720,40	1.007,63	39,87	45,44	100,00

Sumber: BPS 2021

3.3. kondisi Industri Pengolahan Jakarta

Industri alat angkutan merupakan sub sektor terbesar dalam Industri Pengolahan di DKI Jakarta. Tahun 2020, jenis industri ini memberikan kontribusi sebesar 54,6% terhadap total nilai tambah di sektor industri pengolahan, diikuti oleh subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional dengan pangsa sebesar 12,3%, serta subsektor industri makanan minuman dengan pangsa sebesar 7,7% . Sementara sub sektor Industri Pengolahan yang mengalami pertumbuhan positif ada tiga, yaitu industri makanan dan minuman, industri kertas, dan industri kimia. Sebaliknya, kontraksi paling dalam terjadi pada subsektor utama dari industri pengolahan, yakni industri alat angkutan. Hal tersebut seiring dengan penurunan permintaan global maupun domestik sebagai dampak pandemi Covid-19.



Sumber: BPS, diolah

Gambar 3.8. Pertumbuhan PDRB dan Industri Pengolahan Tahun 2020

BAB 4 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN JAKARTA

4.1. Kebijakan Industri Nasional

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024 diungkapkan bahwa pembangunan ekonomi dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Ada 10 industri prioritas sebagai berikut:

1. industri pangan (makanan dan minuman);
2. industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
3. industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
4. industri alat transportasi;
5. industri elektronika dan telematika/ICT;
6. industri pembangkit energi;
7. industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
8. industri hulu agro;
9. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
10. industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

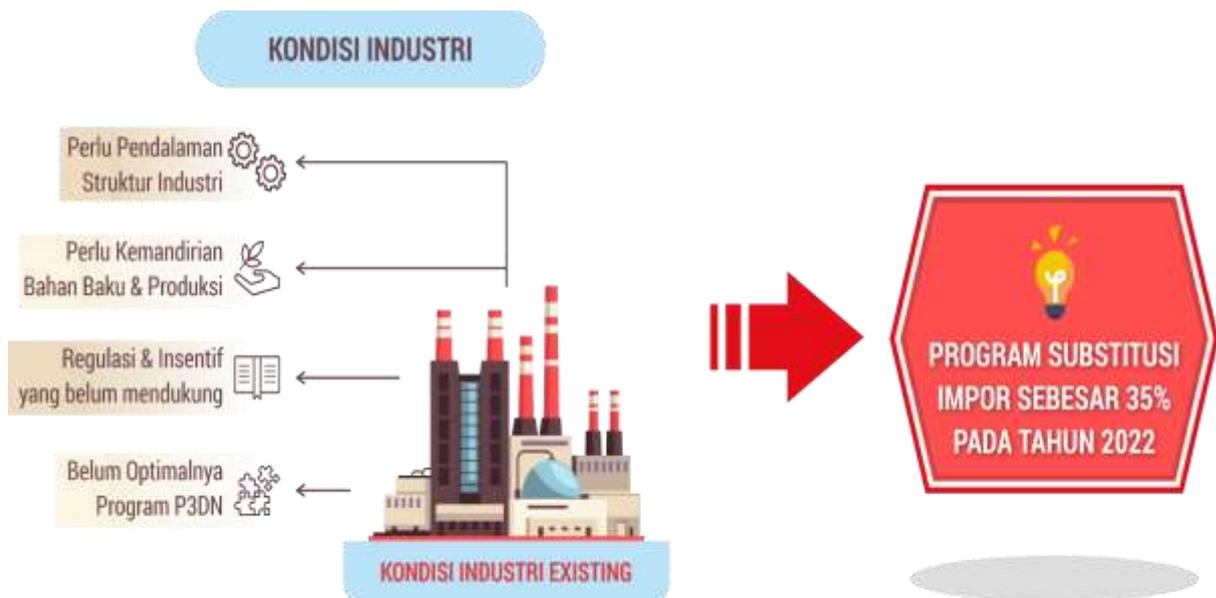
Kebijakan tersebut diatas merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Sementara itu, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 telah menetapkan pentahapan capaian pembangunan Industri kedalam tiga periode, yaitu tahap I 2015-2019, tahap II 2020-2024, dan tahap III 2025-2035. Pada tahap II ini, pembangunan industri nasional diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Untuk mewujudkan capaian tersebut di atas tentu tidaklah mudah, apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 dimana banyak industri harus mengurangi atau menghentikan beroperasi yang bermuara pada menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk memulihkan ekonomi nasional, ada beberapa program yang telah dikeluarkan pemerintah, yaitu:

1. Program substitusi impor sebesar 35% pada tahun 2022
2. Program penurunan harga gas
3. Program pengembangan digital capability center (DCC)
4. Program pengembangan vokasi industri



Sumber: Kemenperin, 2020

Gambar 4.1. Program substitusi impor 35% pada tahun 2022

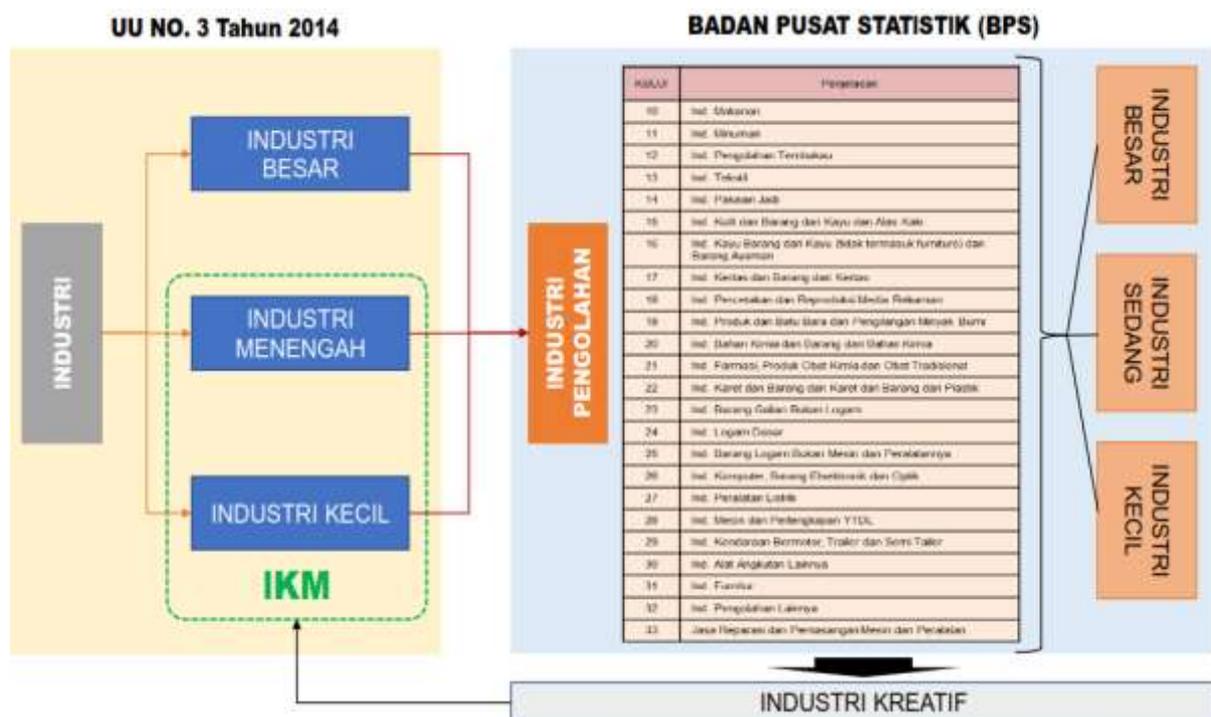


Sumber: Kemenperin, 2020

Gambar 4.2. Konsep program pengembangan Digital Capability Center (DCC)

4.2. Tujuan dan Arah Kebijakan Industri Jakarta

Saat kajian ini dilaksanakan, Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) sebagai amanah Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Penyusunan RPIP mengacu pada konsep, pedoman dan aturan yang terdapat dalam UU Perindustrian ini, antara lain klasifikasi industri pengolahan, dan posisi industri kreatif dalam industri.



Sumber: Dinas PPKUKM (2021)

Gambar 4.3. Konsepsi Dasar industri

Pada UU 3/2014 Pasal 10 menetapkan bahwa:

1. Setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
2. Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035) dan Kebijakan Industri Nasional.
3. Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Industri daerah;

- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
4. Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya penyusunan RPIP bagi Pemprov DKI Jakarta diperkuat dengan Perda No. 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian, terutama pada pasal 5 yang mengaskan bahwa:

1. Pemerintah Daerah menyusun Rencana induk Pengembangan industri Daerah dengan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan kebijakan industri nasional serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
2. Rencana pembangunan industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya industri di daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana detail tata ruang wilayah; dan
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
3. Rencana induk pengembangan industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha industri daerah dalam perencanaan dan pengembangan industri daerah.
4. (4) Rencana induk pengembangan industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perda DKI Jakarta ini mengutamakan 5 aspek yang penting dalam membangun industri di Jakarta, yaitu:

1. Pengwilayahan industri
2. Sumber daya industri
3. Sarana dan prasarana industri
4. Perizinan, penanaman modal dan fasilitas
5. Pengawasan dan pengendalian



Sumber: Dinas PPKUKM (2021)

Gambar 4.4. Penyelenggaraan Perindustrian

Dasar Pedoman Penyusunan RPIP dan RAPERDA adalah Peraturan Menteri Perindustrian No. 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Industri yang dimaksud disini adalah industri pengolahan Nonmigas, yaitu industri yang masuk kategori C (Industri Pengolahan) dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tidak termasuk industri batubara dan pengilangan migas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan RAPERDA.



Gambar 4.5. Perangkat Daerah dalam Pembangunan industri

Berdasarkan keterangan Dinas PPKUKM DKI Jakarta bahwa Pembangunan Industri Provinsi bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang industri serta penguasaan teknologi modern;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memberi nilai tambah bagi pertumbuhan industri pengolahan non migas;
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas industri agar berdaya saing tinggi di tingkat global dengan mendorong penggunaan teknologi modern dan inovasi yang mengedepankan efisiensi sumber daya industri dan kelestarian lingkungan hidup;
4. Mengembangkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, serta pelaku industri dalam upaya penguatan kemampuan masyarakat untuk berinovasi dan berkreasi;
5. Meningkatkan nilai investasi pada industri pengolahan non migas.

Dengan memperhatikan Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 (Pasal 89) maka Pengwilayahan Industri DKI Jakarta dimaksudkan untuk pemanfaatan dan pengelolaan kawasan industri dan pergudangan, dilakukan melalui:

1. Penataan kawasan industri sebagai bagian integral dari penataan kawasan pelabuhan melalui koordinasi dan kerjasama dengan kawasan Bodetabekpunjur;
2. Mengembangkan kawasan industri dibatasi untuk industri hemat penggunaan lahan, hemat air dan energi, tidak berpolusi, memperhatikan aspek lingkungan dan menggunakan teknologi tinggi;
3. Pengembangan industri perakitan di kawasan sekitar Bandara Soekarno Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok;
4. Mengembangkan Kawasan Ekonomi Strategis di Marunda sebagai bagian integral dari pengembangan pelabuhan Tanjung Priok;
5. Penataan dan relokasi industri kecil dan menengah yang berada di kawasan permukiman ke kawasan industri di bagian Barat dan Timur Jakarta;

6. Pengembangan kawasan industri memperhatikan daya dukung transportasi dan infrastruktur lain.

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2018 tentang Perindustrian (Pasal 3) maka Tugas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Industri adalah:

1. Menyediakan prasarana dan sarana industri
2. Mengembangkan sumber daya manusia industri
3. Mendorong pengembangan industri berwawasan lingkungan
4. Memfasilitasi ketersediaan, pendistribusian, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri melalui kerja sama antar Daerah
5. Mengembangkan peningkatan penguasaan, dan pemanfaatan Teknologi Industri
6. Memfasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri
7. Memfasilitasi promosi produk hasil Industri dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/ atau lembaga lain ke Industri kecil, Industri menengah, dan Industri kreatif
8. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna bagi Industri
9. Memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dalam pembangunan Industri
10. Memfasilitasi ketersediaan pembiayaan untuk pemberdayaan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri Kreatif
11. Menyediakan data Industri melalui sistem informasi Industri daerah yang terintegrasi
12. Memberdayakan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri Kreatif
13. Memberi Izin Usaha Industri
14. Mendorong penanaman modal di bidang Industri
15. Memberikan insentif dalam penyelenggaraan Perindustrian
16. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Perindustrian
17. Membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan Perindustrian

4.3. Strategi dan Program Pembangunan Industri Jakarta

Strategi dan Program Pembangunan Industri Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

Tahap 1 (2021-2025)

- Pembangunan industri pendukung dan industri unggulan melalui penyiapan infrastruktur dan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri serta penguasaan teknologi modern.
- Penekanan pada peningkatan dan pertumbuhan industri kreatif berdaya saing serta pengembangan IKM.
- Untuk mendukung hal ini, diperlukan peningkatan infrastruktur baik di dalam KI maupun di luar KI serta peningkatan inovasi dan kreativitas, sehingga sektor industri mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sesuai target yang ditetapkan.

Tahap 2 (2026-2030)

Arah rencana pembangunan industri daerah pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kota Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) didukung dengan sektor industri yang maju dan berdaya saing tinggi di tingkat global serta berbasis inovasi dan teknologi modern serta infrastruktur yang memadai.

Tahap 3 (2031-2041)

Arah rencana pembangunan industri daerah pada tahap ini dimaksudkan untuk mewujudkan industri unggulan daerah yang produktif dan berdaya saing global dengan fokus utama mencapai industri unggulan daerah yang berdaya saing global berlandaskan sarana dan prasarana industri yang memadai, sehingga perekonomian daerah yang kuat dan berkualitas serta kapasitas inovasi dan kreativitas yang terus meningkat sesuai target yang ditetapkan.

Berdasarkan Perda 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian (Pasal 52, 53), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah perbatasan dan/atau Pemerintah Daerah lain, perguruan tinggi, asosiasi dan swasta dalam penyelenggaraan perindustrian. Perusahaan Industri besar dan perusahaan Kawasan Industri besar wajib melakukan kemitraan dengan usaha industri kecil/industri menengah/industri kreatif.

Bentuk Kemitraan yang dimaksud dapat berupa:

1. Pemasaran
2. Penyediaan Lokasi Usaha
3. Penyediaan Pasokan Bahan Baku
4. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
5. Pengembangan SDM
6. Bantuan Permodalan
7. Sub Kontrak antara industri besar dengan industri kecil, industri menengah dan industri kreatif

BAB 5 STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN JAKARTA DI MASA AKAN DATANG

5.1. Lingkungan industri

Pembangunan industri pengolahan di Jakarta dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dengan beberapa permasalahan dan isu dimasa akan datang, antara lain:

1. Tata Ruang
2. Inovasi Produk
3. Efisiensi Produksi dan Ketersediaan Bahan Baku
4. Keterbatasan Lahan, Utilitas Air, Gas, Pengolahan Limbah
5. SDM yang kompeten untuk menjawab kebutuhan dan kemajuan teknologi di Era Industri 4.0. (link and match)
6. Industri Hijau dan Berkelanjutan
7. Investasi
8. Logistik (Pergudangan)
9. Fasilitasi Pembiayaan
10. Akses Pasar Global (tekanan produk impor)
11. Pengembangan IKM

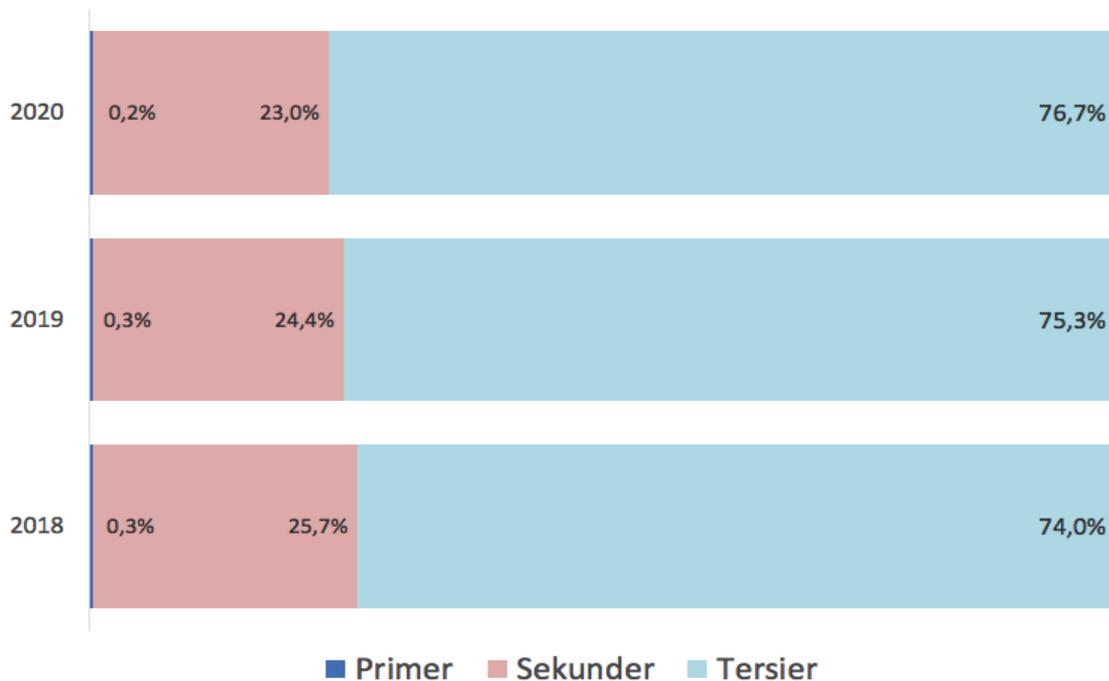
Tantangan ini perlu disikapi dengan memperhatikan 3 kunci utama, yaitu:

1. Struktur ekonomi,
2. Struktur demografi, dan
3. Kemampuan inovasi.

1. Struktur Ekonomi yang tergantung pada sektor tersier

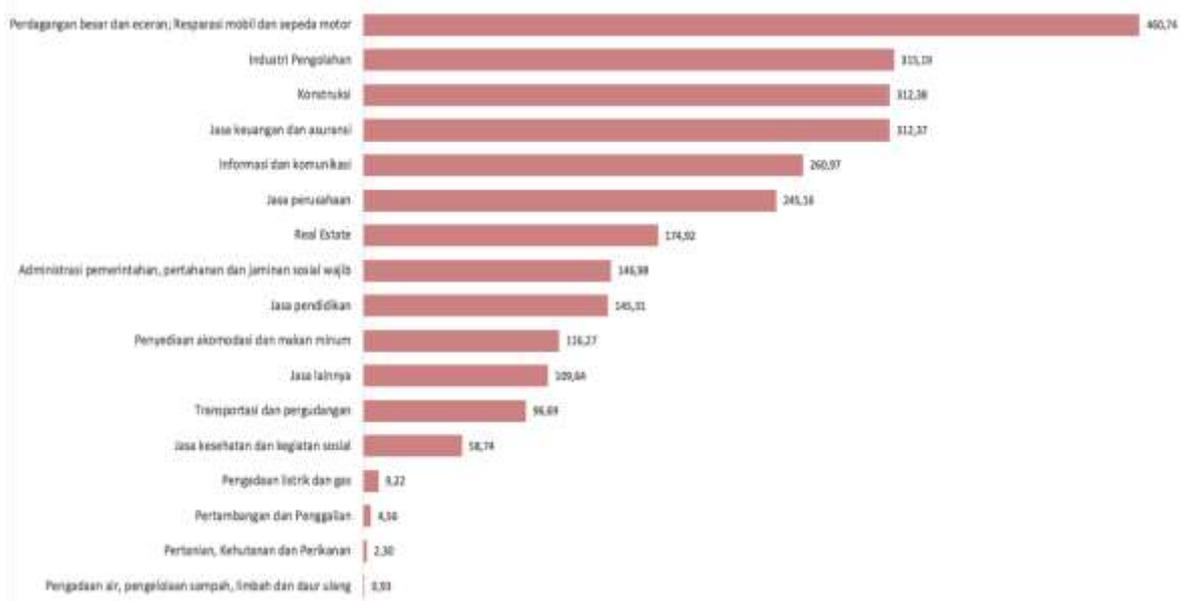
Struktur ekonomi dari DKI Jakarta juga sangat menopang untuk menjadi Kota Riset dan Jasa, salah satunya ketergantungan terhadap sektor tersier. Berdasarkan data dari BPS, dalam 3 tahun terakhir, sektor tersier atau jasa memiliki proporsi terbesar pada PDRB DKI Jakarta. Terdapat peningkatan proporsi sektor tersier

dalam 2 tahun terakhir yang pada tahun 2020 proporsinya berada pada angka 76,7%. Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta bertopang diri pada sektor jasa dalam perekonomiannya.



Sumber: BPS, diolah

Gambar 5.1. Proporsi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku DKI Jakarta 2020



Sumber: BPS, diolah

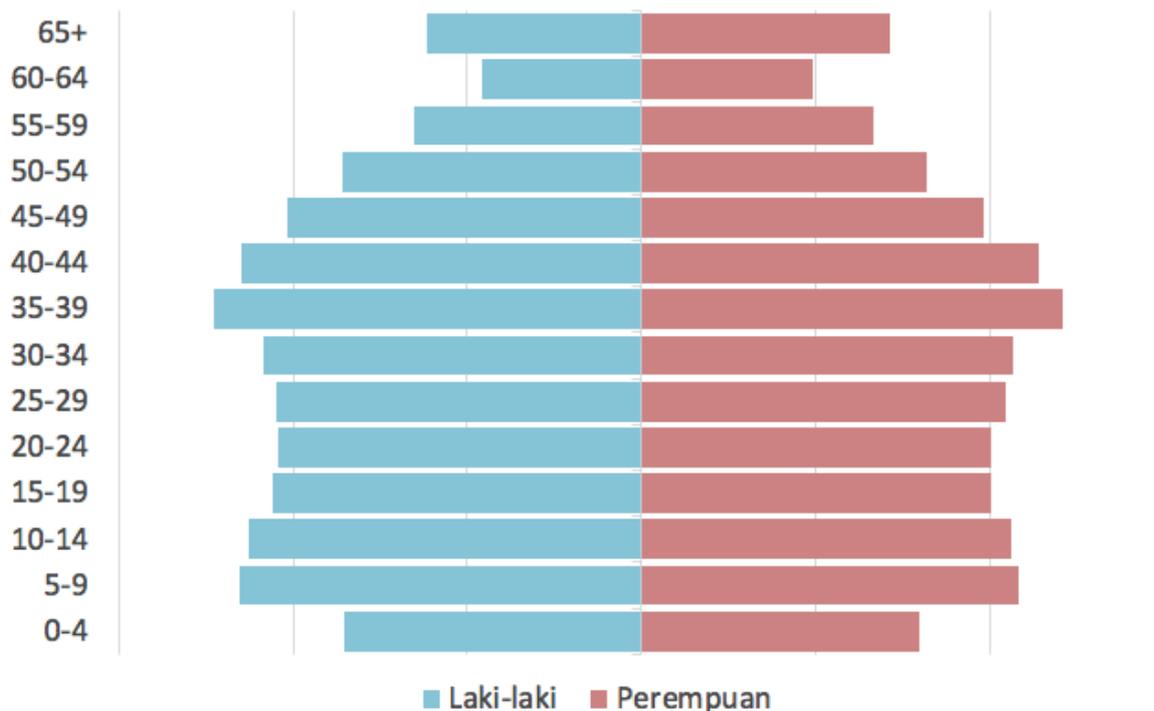
Gambar 5.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku DKI Jakarta berdasarkan Sektor, 2020 - dalam triliun rupiah

2. Struktur ekonomi berbasis produktivitas tiap sektor

Jika dilihat lebih dalam berdasarkan 17 sektor, penyumbang terbesar bagi PDRB DKI Jakarta merupakan sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Kemudian diikuti oleh industri pengolahan, konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, serta sektor informasi dan komunikasi.

3. Struktur demografi dengan penduduk yang besar

Struktur demografi di DKI Jakarta juga merupakan indikator penting. Berdasarkan piramida penduduk DKI Jakarta, dapat dilihat bahwa proporsi penduduknya saat ini memiliki jumlah yang relatif besar pada usia kerja (15-64 tahun). Hal ini berarti tingkat ketergantungan di DKI Jakarta memiliki angka yang relatif rendah.



Sumber: BPS, diolah

Gambar 5.3. Piramida Penduduk DKI Jakarta Tahun 2020

4. Kemampuan inovasi teknologi industri 4.0

Perkembangan teknologi industri semakin cepat. Kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan Artificial Intelligence menjadikan pengelolaan industri dapat jauh lebih efisien dan efektif. Untuk ini, Kementerian Perindustrian meluncurkan

Program Nasional Making 4.0 dengan 10 program strategis, antara lain memperbaiki aliran material di sektor manufaktur, mendesain ulang zona industri nasional, menerapkan standar sustainability pada semua sektor industri, memberdayakan umkm secara maksimal, memulai pembangunan infrastruktur digital nasional, menarik minat investasi asing, peningkatan kualitas SDM, pembangunan ekosistem inovasi, insentif untuk investasi teknologi, dan harmonisasi aturan dan kebijakan.



Gambar 5.4. Program 'Making Indonesia 4.0'

5.2. Analisis strategi

Dengan mempertimbangkan kondisi dan tren ekonomi maka hasil kajian menilai bahwa DKI Jakarta perlu melakukan reposisi industri pengolahannya dengan dua isu utama, yaitu:

1. Penguatan peran belanja pemerintah dalam mengembangkan industri jasa, industry riset, dan industri kreatif yang bernilai tambah tinggi
2. Reposisi DKI Jakarta untuk tetap menjadi pusat agglomerasi ekonomi bersih, industri high-tech, dan industri hospitality

Dari dua isu utama tersebut diatas maka dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam membangun industri DKI Jakarta dimasa akan datang, yaitu:

1. Kekuatan (S: Strengths)
 - Bagian dari International Hub (Logistik, Bisnis)
 - Infrastruktur yang memadai untuk bertransformasi menjadi kota riset, industri jasa dan internasional
 - Di dukung Kota-Kota Satelit yang berbasiskan Industri, Pendidikan, Jasa

2. Kelemahan (W: Weaknesses)
 - Trend industri pengolahan menurun
 - Didominasi industri butuh ruang
 - Rentan terhadap Pandemi
 - Komposisi pengeluaran didominasi konsumsi
 - Karakteristik TK di Manufaktur tidak cocok untuk Ekonomi Jakarta

3. Peluang (O: Opportunities)
 - Local taxing power dari UU HKPD (Opsen PPH)
 - Bonus Demografi
 - Penggunaan Big Data
 - Industri 4.0
 - Penggunaan PDN dan UMKM

4. Tantangan (T: Threats)
 - Kepindahan IKN
 - Basis Pajak dari Transaksi Digital
 - Trend Industri Bersih
 - Net Zero emission/Rendah karbon
 - De-agglomerasi
 - De-industrialisasi

Berdasarkan kekuatan (Strengthening) kelemahan (Weakness) peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) di atas maka ada 4 Skenario Strategi yang dapat disusun, yaitu:

1. Strategi SO:

- Menjadikan Jakarta sebagai etalase hasil industri, inovasi dan kreatifitas
- Menyiapkan scenario tarif pajak yang optimal agar bisa menarik investasi dan produksi barang dan jasa di Jakarta
- Memanfaatkan land value capture dari dampak limpahan pembangunan infrastrukstur , missal pembangunan MRT
- Memperkuat industri jasa dan industri kreatif

2. Strategi WO:

- Menggunakan Big data dalam analisis perilaku konsumen dan trend konsumsi barang dan jasa masyarakat
- Mendorong belanja produktif yang meningkatkan permintaan PDN dan produk UMKM
- Mengkonversi lahan-lahan idle menjadi Kawasan industri jasa, kreatif, riset dan hospitality

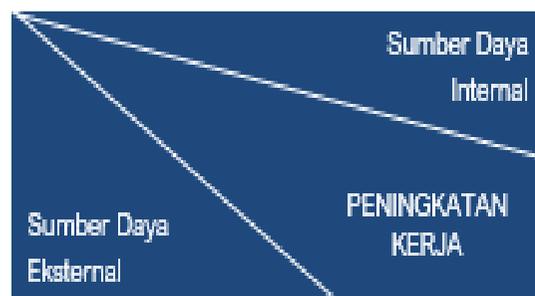
3. Strategi ST:

- Menarik investasi di bidang riset dan industri jasa
- Memberikan insentif kepada Industri hijau/rendah karbon
- Menyiapkan kebijakan dan infrastrukstur ekonomi digital (pendaftaran, penagihan, pembayaran)
- Memperkuat industry logistic yang mendukung industry pengolahan daerah sekitar dan kegiatan ekspor impor

4. Strategi WT:

- Memperkuat administrasi perpajakan dengan basis ekonomi digital
- Memperkuat Kerjasama dengan daerah sekitarnya sebagai kesatuan supply chain industry pengolahan

Tabel 5.1. Analisis SWOT



KEKUATAN (STRENGTHS)

- Bagian dari International Hub (Logistik, Bisnis)
- Infrastruktur yang memadai untuk bertransformasi menjadi kota riset, industri jasa dan internasional
- Di dukung Kota-Kota Satelit yang berbasis Industri, Pendidikan, Jasa

KELEMAHAN (WEAKNESSES)

- Trend industri pengolahan menurun
- Didominasi industri butuh ruang
- Rentan terhadap Pandemi
- Komposisi pengeluaran didominasi konsumsi
- Karakteristik TK di Manufaktur tidak cocok untuk Ekonomi Jakarta

PELUANG (OPPORTUNITIES)

- Local taxing power dari UU HKPD (Opsen PPH)
- Bonus Demografi
- Penggunaan Big Data
- Industri 4.0
- Penggunaan PDN dan UMKM

STRATEGI SO:

- Menjadikan Jakarta sebagai etalase hasil Industri, Inovasi dan kreatifitas dari
- Menyampaikan scenario tarif pajak yang optimal agar bisa menarik Investasi dan produksi barang dan jasa di Jakarta
- Memanfaatkan land value capture dari dampak limpahan pembangunan Infrastruktur , misal pembangunan MRT
- Memperkuat Industri jasa dan Industri kreatif

STRATEGI WO:

- Menggunakan Big data dalam analisis perilaku konsumen dan trend konsumsi barang dan jasa masyarakat
- Mendorong belanja produktif yang meningkatkan permintaan PDN dan produk UMKM
- Mengkonversi lahan-lahan idle menjadi Kawasan Industri jasa, kreatif, riset dan hospitality

TANTANGAN (THREATS)

- Kepindahan IKN
- Basis Pajak dari Transaksi Digital
- Trend Industri Bersih
- Net Zero emission/Rendah karbon
- De-agglomerasi
- De-industrialisasi

STRATEGI ST:

- Menarik Investasi di bidang riset dan Industri jasa
- Memberikan insentif kepada Industri hijau/rendah karbon
- Menyampaikan kebijakan dan Infrastruktur ekonomi digital (pendaftaran, penagihan, pembayaran)
- Memperkuat Industry logistic yang mendukung Industry pengolahan daerah sekitar dan kegiatan ekspor impor

STRATEGI WT:

- Memperkuat administrasi perpajakan dengan basis ekonomi digital
- Memperkuat Kerjasama dengan daerah sekitarnya sebagai kesatuan supply chain Industry pengolahan

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis strategi di atas maka berikut beberapa rekomendasi dalam pembangunan industri pengolahan di Jakarta di masa akan datang, yaitu:

1. Menyusun Roadmap Industri yang mempertimbangkan Industri 4.0 dan Industri Hijau, yang berbasis digitalisasi dan berkarakteristik High Tech
2. Menjadikan DKI Jakarta sebagai International Hub untuk Pusat Logistik dan Pintu Gerbang kegiatan Ekspor dan Impor bagi daerah sekitarnya
3. Mengembangkan Industri dengan konsumsi energi hijau/energi biru (ramah lingkungan) dan minim ruang, namun menghasilkan nilai tambah yang besar seperti industri kreatif, industri jasa, dan industri riset
4. Membangun sumber daya manusia yang akan berpartisipasi di industri dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat
5. Membangun ekosistem inovasi dan kewirausahaan melalui belanja pemerintah yang berkualitas dan produktif
6. Menyiapkan insentif fiskal yang optimal untuk menarik investasi di sektor bisnis, riset, dan jasa
7. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat dalam pemberian layanan untuk meningkatkan investasi dan produktivitas industri

DAFTAR PUSTAKA

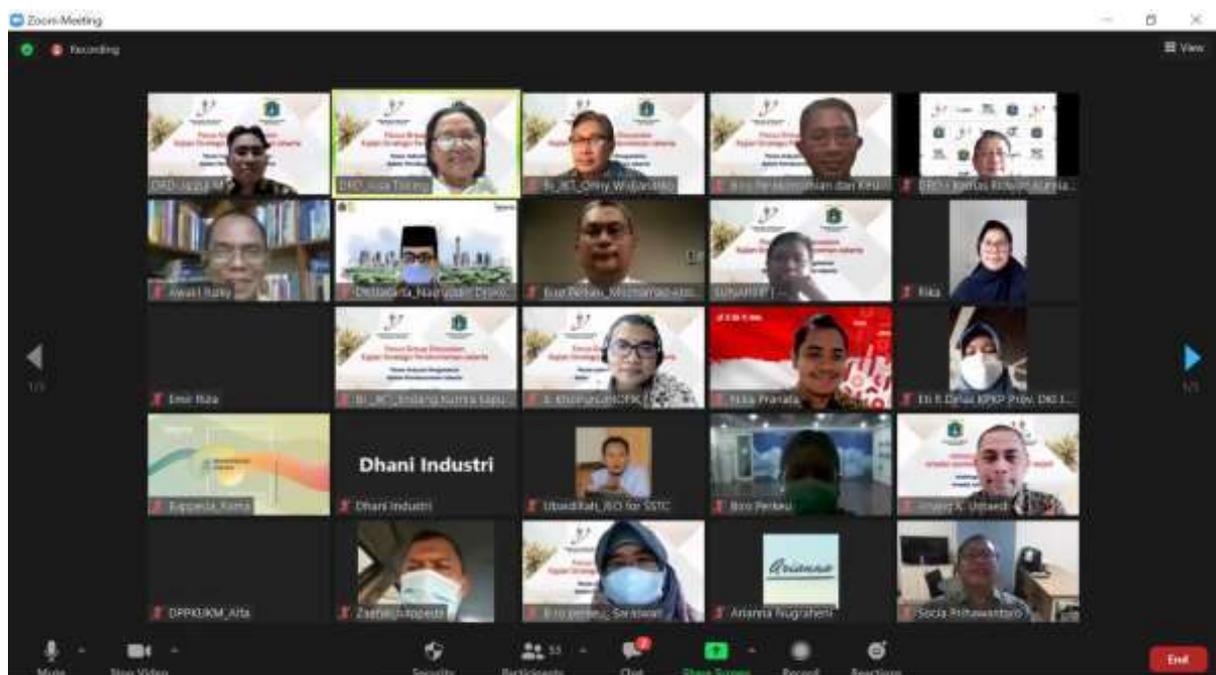
1. Asisten Perekonomian DKI Jakarta. 2021. Peran Industri Pengolahan dalam Perekonomian Jakarta. Dalam FGD DRD DKI Jakarta 27 Agustus 2021 di Jakarta.
2. Bank Indonesia Perwakilan Jakarta. 2021. Peran Industri Pengolahan dalam Perekonomian Jakarta. Dalam FGD DRD DKI Jakarta 27 Agustus 2021 di Jakarta.
3. BPS Provinsi DKI Jakarta. 2021. Berita Resmi Statistik. Edisi Agustus 2021.
4. Dirjen ILMATE Kemenperin. 2021. Dalam FGD DRD DKI Jakarta 5 November 2021 di Jakarta.
5. Bank Indonesia. 2021. Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Edisi Mei 2021
6. Kemenperin. 2021. Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024

DOKUMENTASI KEGIATAN

FGD I: Peran Industri Pengolahan Dalam Perekonomian Jakarta

Aplikasi Zoom

27 Agustus 2021



FGD II: Kebijakan Pembangunan Industri Nasional Implikasinya bagi Industri Pengolahan dan Perekonomian di DKI Jakarta

Aplikasi Zoom

5 November 2021



Rapat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Lat 8 Ruang Rapat DRD DKI Jakarta

21 desember 2021



**Validasi dan Diseminasi Hasil Kajian
Ruang Kolaborasi Kantor Asisten Bid, Perekonomian dan Keuangan
Pemprov DKI Jakarta
28 Desember 2012**

